

KAJIAN MANDIRI

DIPLOMASI EKONOMI
INDONESIA DI FORA
MULTILATERAL:
TINJAUAN AGENDA
PRESIDENSI INDONESIA DI G20
TAHUN 2022

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kementerian Luar Negeri RI
2020

**Diplomasi Ekonomi Indonesia di Fora Multilateral: Tinjauan Agenda
Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022**

Pengarah dan Penanggung Jawab

Siswo Pramono

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Penyunting

Rio Budi Rahmanto

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral,
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Tim Penulis

Perry Pada, Joevi Roedyati, Tamel V. Sinabutar, Dhani Eko Wibowo, Hardiyono Kurniawan, Fattah Hardiwinangun, Lucky Nugraha, Rahmawati Wulandari, Andri Haekal Karnadibrata, Robertus Aji Putro, Yustia Rahma Priyantari, Hudzaifah Abdullah, Handayani Lintang Purwaning Ayu

Diterbitkan oleh

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon No.6

Jakarta Pusat 10110

Tel. (021) 384 9810 ext. 7709

Faks. (021) 386 1385

Surel: pppk_oi@kemlu.go.id

ISBN : 978-602-51358-6-6 (PDF)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Pendapat maupun pandangan yang disampaikan dalam tulisan dan presentasi yang ada di dalam kajian ini tidak mewakili pandangan maupun kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

KATA PENGANTAR



Kajian Mandiri dengan tema “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Fora Multilateral: Tinjauan Agenda Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022” ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri, untuk mengkaji 2 (dua) peran strategis diplomasi ekonomi, yaitu pembentukan norma ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua isu tersebut merupakan kepentingan nasional Indonesia yang sejalan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 dan dapat dimajukan sebagai agenda prioritas pada masa kepemimpinan G20 Indonesia pada tahun 2022. Kajian Mandiri disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi dan memberikan rekomendasi strategis dalam menyusun kebijakan mengenai ekonomi digital dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM.

Pertama, sektor ekonomi digital dan *e-commerce* memainkan peran kunci untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan dunia pada era Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0). Isu ekonomi digital dan *e-commerce* dalam forum G20 telah dibahas sejak tahun 2015 dan telah menjadi isu sentral dalam diskursus ekonomi digital. Para negara anggota G20 sebelumnya telah memanfaatkan momentum Presidensi untuk mengangkat berbagai isu ekonomi digital, seperti inklusivitas dalam ekonomi digital, memajukan prinsip *fairness*, serta menuju norma *free and open*.

Menuju masa Presidensi G20 pada 2022, Indonesia dapat mengedepankan pembentukan norma (*norm setting*) bidang ekonomi digital untuk mengatasi kesenjangan teknologi dan infrastruktur digital, baik antar negara maupun di dalam suatu negara. Selain itu, pelaku ekonomi digital di negara berkembang memiliki berbagai keterbatasan, antara lain, kapasitas pendanaan, investasi, SDM, dan aset, untuk dapat bersaing secara langsung dengan perusahaan digital dari negara maju.

Dalam tataran pembentukan norma, Indonesia dapat mengangkat 3 (tiga) isu konkret di bidang ekonomi digital sebagai agenda prioritas G20 tahun 2022 yaitu: (1) isu *cross-border data flows* (lokalisasi data); (2) isu inovasi dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan (3) isu pajak digital dan bea masuk barang digital. Ketiga isu sentral tersebut diharapkan dapat membentuk suatu *unified approach* dan menjadi *driving force* antar negara anggota G20 dalam mencapai suatu konsensus global di bidang ekonomi digital.

Kedua, aspek peningkatan daya saing dan produktivitas SDM yang dibahas di G20 dalam konteks ketenagakerjaan, SDM dan pendidikan perlu menjadi perhatian utama dalam proses pemulihan ekonomi global. Aspek peningkatan daya saing dan produktivitas SDM dapat diangkat selaras dengan rencana strategis “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” pada RPJMN 2020 – 2024.

Indonesia dapat memajukan agenda prioritas terkait ketenagakerjaan, SDM dan pendidikan dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM. Indonesia dapat memastikan sinergi agenda, dan tidak menutup kemungkinan melakukan pertemuan bersama, antar *working groups* yang relevan, yaitu *Employment Working Group* (EWG), *Development Working Group* (DWG), dan *Education Working Group* (EdWG) untuk membahas berbagai aspek yang bersifat *cross-cutting*. Melalui pertemuan bersama atau sinergi antar *working groups*, diharapkan para *like-minded countries* dapat mendukung agenda prioritas Indonesia di bidang SDM.

Kajian Mandiri ini memberikan opsi agenda prioritas yang dapat diangkat Indonesia pada saat Presidensi Indonesia di G20. Kedua isu di atas sangat relevan bagi negara-negara maju dan *emerging economies* anggota G20, utamanya dalam upaya pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Kajian ini juga telah mengidentifikasi kondisi, pemetaan dan tantangan dalam memajukan kedua agenda tersebut.

Dalam pelaksanaan Kajian Mandiri terdapat berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19. BPPK mengucapkan apresiasi atas dukungan dan rangkaian kerja sama dengan lembaga-lembaga akademi dalam menelaah kedua opsi agenda prioritas tersebut, khususnya Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada dan Tim Riset G20 Universitas Parahyangan.

Harapan kami, Kajian Mandiri dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pimpinan dan unit-unit di lingkungan Kementerian Luar Negeri, namun dapat

menjadi salah satu rujukan bagi Kementerian / Lembaga terkait dan para pemangku kepentingan yang relevan dalam perumusan agenda prioritas kepemimpinan G20 Indonesia, utamanya di bidang ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM. Akhir kata, saya menyampaikan apresiasi yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian Kajian Mandiri ini.

Jakarta, 31 Desember 2020



Siswo Pramono

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Kementerian Luar Negeri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Arti Penting Presidensi Indonesia di G20.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan Kajian.....	4
1.4 Rumusan Masalah.....	5
1.5 Kerangka Kajian.....	5
1.6 Metodologi.....	6
BAB II EKONOMI DIGITAL DALAM KERANGKA KERJA SAMA G20	7
2.1 Isu Ekonomi Digital dalam G20.....	7
2.2 Pemetaan Aliansi Diplomasi Ekonomi Digital Indonesia.....	20
2.2.1 <i>Cross-Border Data Flows</i>	20
2.2.2 Desentralisasi Norma Inovasi di Forum G20.....	24
2.2.3 Pajak Digital <i>E-Commerce</i> dan Moratorium <i>E-Commerce</i>	28
BAB III PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS SDM	37
3.1 Perkembangan Pembahasan Isu Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.....	38
3.1.1 Pembahasan Isu Ketenagakerjaan.....	39
3.1.2 Pembahasan Isu SDM.....	41
3.1.3 Pembahasan Isu Pendidikan.....	43
3.2. Kondisi dan Tantangan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia di Indonesia.....	58
3.2.1 Tantangan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas SDM.....	58
3.2.2 Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas SDM.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.1.1 Ekonomi Digital.....	64
4.1.2 Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia.....	67
4.2 Peran Kementerian Luar Negeri.....	67
4.3 Rekomendasi Kebijakan.....	68
4.3.1 Ekonomi Digital.....	68
4.3.2 Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia.....	71
4.3.2.1 Aspek Ketenagakerjaan (EWG).....	71

4.3.2.2 Aspek Pendidikan (EdWG).....	73
4.3.2.3 Aspek Sumber Daya Manusia (DWG).....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penyerapan Tenaga Kerja per Investasi.....	59
Gambar 2. Penyerapan Tenaga Kerja Berkompetensi.....	60
Gambar 3. Ketidaksesuaian Antara Pendidikan dan Kebutuhan Tenaga Kerja.....	60
Gambar 4. Misi dan Arah Presiden serta 7 Agenda Pembangunan.....	62
Gambar 5. <i>GDP Growth Rates</i>.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Isu dan Komitmen Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Ekonomi Digital Bidang Ekonomi Digital.....	11
Tabel 2. Potensi Aliansi Isu Aliran Data Lintas Batas.....	22
Tabel 3. Potensi Aliansi Isu Hak Atas Kekayaan Intelektual Digital.....	25
Tabel 4. Posisi Negara G20 untuk Pajak dan Bea Masuk Barang Digital	32
Tabel 5. Kepentingan Indonesia dan Negara G20 untuk Pajak Digital dan Bea Masuk Barang Digital.....	35
Tabel 6. Perbandingan <i>Outcome</i> G20 Periode 2018 – 2020 untuk Isu Pendidikan dan Ketenagakerjaan	46
Tabel 7. Peluang Aliansi Indonesia dengan Negara-Negara G20.....	66
Tabel 8. Aspek-aspek Pembahasan Isu Ketenagakerjaan pada Presidensi Indonesia di G20.....	72
Tabel 9. Aspek-aspek Pembahasan Isu Pendidikan pada Presidensi Indonesia di G20.....	74
Tabel 10. Aspek-aspek Pembahasan Isu Sumber Daya Manusia pada Presidensi Indonesia di G20.....	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan Indonesia di forum G20 atau *Group of Twenty (G20)* semula dijadwalkan pada tahun 2023 namun dengan berbagai pertimbangan ekonomi-politik global, Presidensi Indonesia dimajukan menjadi tahun 2022. Peran Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 cukup strategis mengingat Indonesia dapat memainkan peran dalam pemulihan dan menghidupkan kembali ekonomi global.

Pembentukan G20 berawal dari ketidakmampuan *Group of Seven/G7* mengatasi permasalahan ekonomi saat itu, terutama dalam menjaga stabilitas finansial global. Pandangan saat itu adalah perlunya negara-negara berpendapatan menengah dan negara-negara yang memiliki pengaruh ekonomi secara terpadu berpartisipasi dalam perundingan untuk mencari solusi permasalahan ekonomi global. G20 dibentuk tahun 1999 yang berawal dari pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sebagai upaya memperluas diskusi tentang kebijakan untuk mengatasi krisis ekonomi dan finansial global.

G20 memiliki anggota 19 negara, yakni Amerika Serikat (AS), Argentina, Brazil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. Direktur Pengelola *International Monetary Fund (IMF)* dan Presiden Bank Dunia bersama dengan Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan turut berpartisipasi pada pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pertama dilaksanakan tahun 2008 di Washington DC, Amerika Serikat, untuk mengatasi krisis finansial yang berawal dari krisis keuangan di AS yang banyak mempengaruhi negara-negara maju lain. Pada KTT G20 di Cannes, Perancis, tahun 2011, disepakati bahwa G20 memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kebijakan negara-negara G20 dan menghasilkan kesepakatan politik yang diperlukan

untuk menangani tantangan-tantangan akibat interdependensi ekonomi global.

KTT G20 di Los Cabos, Mexico, tahun 2012, KTT G20 di Saint Petersburg, Rusia, tahun 2013, dan KTT G20 di Brisbane, Australia, tahun 2014, sama-sama menitikberatkan pada reformasi kebijakan makroekonomi bagi penguatan sektor finansial dan fiskal serta sektor ketenagakerjaan, khususnya isu pengangguran dan *underemployment*.

Pada KTT G20 di Antalya, Turki, tahun 2015, KTT G20 di Hangzhou, China, tahun 2016, dan KTT G20 di Hamburg, Jerman, tahun 2017, fokus pembahasan mengarah pada urgensi pengikutsertaan agenda pembangunan ekonomi digital global beserta inisiatif maupun *roadmap*-nya sebagai dokumen konkret. Sektor ketenagakerjaan (*quality employment*), finansial, dan fiskal juga masih menjadi isu prioritas.

Selanjutnya pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, tahun 2018, KTT G20 di Osaka, Jepang, tahun 2019, serta KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi, tahun 2020, masih memfokuskan pada penguatan peran ekonomi digital untuk mencapai inklusivitas digital, penguatan inovasi digital, dan menjembatani *digital divide* dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital.

1.2 Arti Penting Presidensi Indonesia di G20

Pandemi COVID-19 menciptakan krisis multidimensional dengan skala dan kecepatan yang belum pernah dialami sebelumnya. Situasi ekonomi global hingga akhir tahun 2020 masih belum menunjukkan perkembangan positif. Besar harapan ketersediaan vaksin dan penyebaran vaksin pada tahun 2021 dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi global. Presidensi G20 Indonesia diproyeksikan masih berada dalam situasi pemulihan ekonomi nasional dan global akibat pandemi COVID-19.

G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia. Oleh sebab itu, keberhasilan negara-negara G20 dalam mengatasi tantangan ekonomi dan melakukan pemulihan ekonomi dengan cepat, akan memiliki dampak positif terhadap ekonomi global.

Dalam hal ini, masa Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum baik untuk membangun kembali ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Masa

Presidensi Indonesia merupakan kesempatan baik untuk memajukan agenda prioritas yang berorientasi penanganan krisis dan mencegah krisis di masa depan.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Bapak Mahendra Siregar, telah mengarahkan agar G20 mampu memberikan *strategic guidance/direction* terhadap isu-isu global dan menjadi kontributor dalam menyelesaikan kondisi ekonomi global saat ini. Dalam menetapkan isu prioritas G20 perlu diperhatikan 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

- a. Dampak isu-isu global terhadap perkembangan ekonomi dunia dan negara-negara G20;
- b. *Legacy*, sejauh mana Indonesia melanjutkan pembahasan isu-isu tradisional yang telah menjadi pokok pembahasan utama G20; dan
- c. Prioritas dan agenda yang merefleksikan kepentingan nasional yang strategis.

Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki Presidensi yang ditetapkan secara konsensus oleh anggota berdasarkan rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya. Setiap tahun “Troika” – Presidensi sebelumnya, Presidensi tahun berjalan, dan Presidensi mendatang – mengadakan komunikasi dan koordinasi intensif guna memastikan kesinambungan agenda G20. Hal ini berarti bahwa Indonesia sudah akan memainkan peran Troika pada tahun 2021.

Dalam proses pembahasan di G20 terdapat 2 (dua) jalur, yakni:

- a. Jalur Keuangan (*Finance Track*) yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari anggota G20 yang membahas sejumlah agenda sektor keuangan.
- b. Jalur *Sherpa (Sherpa Track)* yang membahas agenda di luar sektor keuangan, dan mempersiapkan berbagai dokumen untuk KTT.

Usulan tema Presidensi Indonesia di G20 yang mengemuka dalam pembahasan lintas Kementerian/Lembaga adalah: “*Collaboration for A Stronger and Sustainable Global Recovery Towards A Resilient and Inclusive*”

Growth"¹. Dalam perspektif ini, aspek pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dicapai melalui kolaborasi G20 dan pencapaian pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif (*Strong, Sustainable, Balance, and Inclusive Growth / SSBIG*).

Fokus kerja Presidensi Indonesia dalam kerangka ini mencakup transformasi ekonomi yang mencakup: (a) Digitalisasi bisnis dan kehidupan masyarakat; (b) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif; (c) Memperdalam aspek ekonomi digital untuk mendukung pembangunan inklusif, antara lain, dengan mengaktifkan kembali inisiatif *Inclusion Digital Economy Accelerator (IDEA Hub)*; dan (d) G20 menyiapkan SDM yang adaptif terhadap krisis dan memiliki *skill* yang relevan dengan masa depan. Dalam kerangka ini pula, isu "*Human Capital Investment*" akan menjadi isu utama yang *cross-cutting* antara *Finance Track* dan *Sherpa Track*.

Dalam pertemuan lanjutan, telah disepakati bahwa tema Presidensi G20 Indonesia adalah "***Recover Together, Recover Stronger***" dan 3 pilar utama *promoting productivity, increasing resiliency and stability*, dan *ensuring sustainable and inclusive growth*. Perlu ditetapkan *flagship* dan *concrete deliverables* untuk Presidensi Indonesia di G20.

Sesuai dengan tema dan sub-tema yang mengemuka tersebut untuk Presidensi Indonesia di G20, perlu kajian untuk menerjemahkan lebih lanjut menjadi agenda prioritas di sektor ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM. Penajaman agenda prioritas ekonomi digital dan pembangunan SDM diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat untuk pemulihan ekonomi global dan mempersiapkan untuk tantangan ekonomi ke depan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

1.3 Maksud dan Tujuan Kajian

Kajian Mandiri "Diplomasi Ekonomi Indonesia di Fora Multilateral: Tinjauan Prioritas Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022" merupakan salah satu upaya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian

¹ Presentasi Powerpoint: "Masukan Sherpa G20 Indonesia Terhadap Substansi Presidensi G20 Tahun 2022", Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, disampaikan pada Rapat Konsultasi Antar K/L Persiapan Substansi Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Kementerian Luar Negeri, 8 Desember 2020.

Luar Negeri, untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang membumi, praktikal, dan berkaitan erat dengan masyarakat terkait upaya pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM. Kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung arah dan kebijakan luar negeri Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Kajian Mandiri “Diplomasi Ekonomi Indonesia di Fora Multilateral: Tinjauan Agenda Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022” berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut: **Bagaimana kepentingan Indonesia dalam isu ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM dapat direfleksikan dalam pembahasan G20 dari tahun 2021 menuju Presidensi Indonesia di tahun 2022, dan sebaliknya, bagaimana kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh konstituen dalam negeri?**

Dalam upaya menjawab rumusan masalah tersebut, Kajian ini berusaha melihat beberapa hal yang lebih spesifik, di antaranya:

1. Bagaimana perkembangan pembahasan isu ekonomi digital dalam forum G20?
2. Bagaimana kondisi perkembangan ekonomi digital dan kesiapan SDM di negara-negara G20?
3. Aspek-aspek apa saja yang perlu ditekankan oleh Indonesia dalam menentukan agenda Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 terkait isu ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM?
4. Apa saja potensi kerja sama/kolaborasi yang dapat dilakukan Indonesia dengan negara-negara G20 terkait pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM?

1.5 Kerangka Kajian

Kajian ini dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang mengenai Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 termasuk arti penting Presidensi G20 bagi Indonesia. Bab pertama juga menjelaskan maksud dan tujuan kajian, rumusan masalah, kerangka kajian, dan metodologi penulisan.

Bab II membahas mengenai isu ekonomi digital dalam kerangka kerja sama multilateral forum G20, pemetaan digital ekonomi sebagai salah satu isu prioritas dalam negeri Indonesia, dan rekomendasi kebijakan Indonesia di bidang ekonomi digital sebagai salah satu opsi agenda Presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022.

Bab III membahas isu peningkatan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia (SDM) terkait isu-isu ketenagakerjaan, SDM dan pendidikan. Isu strategis ini merupakan prioritas bagi Indonesia. Bab ini akan membahas perkembangan pembahasan isu ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan pendidikan di forum G20, serta tantangan dan hambatan peningkatan daya saing dan produktivitas manusia di Indonesia.

Terakhir, Bab IV berisi analisis dan rekomendasi terkait isu ekonomi digital dan pembangunan SDM. Selain itu, Bab ini mengulas peran Kementerian Luar Negeri sebagai wakil Pemerintah RI yang menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan luar negeri untuk mendorong penyusunan agenda prioritas G20 berdasarkan kepentingan nasional Indonesia.

1.6 Metodologi

Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data yang diperlukan dikumpulkan melalui beberapa kegiatan ilmiah yang merupakan instrumen penelitian Kajian, seperti studi kepustakaan, wawancara, Diskusi Terbatas, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Seminar Nasional. Para narasumber mencakup para pakar, praktisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kajian dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan dalam proses pengkajian akibat pandemi COVID-19. Tim kajian Pusat P2K Multilateral BPPK telah melakukan serangkaian kerja sama dengan lembaga-lembaga akademi guna penajaman pembahasan isu ekonomi digital dan pengembangan SDM dengan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada dan Tim Riset G20 Universitas Parahyangan.

BAB II

EKONOMI DIGITAL DALAM KERANGKA KERJASAMA G20

Bab I telah memberikan pengantar mengenai latar belakang, fokus, dan tujuan dari kajian ini. Selanjutnya, Bab II membahas mengenai isu ekonomi digital dalam kerangka kerja sama multilateral forum G20, pemetaan digital ekonomi sebagai salah satu isu prioritas dalam negeri Indonesia, dan rekomendasi kebijakan Indonesia di bidang ekonomi digital sebagai salah satu opsi agenda Presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022.

2.1 Isu Ekonomi Digital Dalam G20

Istilah 'ekonomi digital' pertama kali digunakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di St. Petersburg, Rusia, tahun 2013 dengan pertimbangan pertumbuhan transaksi berbasis *daring* yang tumbuh sangat pesat dan menciptakan *loophole* dalam sistem perpajakan internasional saat itu. Isu mengenai ekonomi digital telah banyak dibahas dalam forum G20 dimulai pada tahun 2016 di bawah Presidensi Tiongkok. Pembahasan menghasilkan *G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative* yang memuat *guiding principles* dan komitmen kerja sama pada beberapa bidang prioritas untuk mengembangkan ekonomi digital.

Pada tahun 2017 di bawah Presidensi Jerman pembahasan mengenai ekonomi digital diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tingkat Menteri melalui *G20 Digital Economy Ministerial Meeting*. Pertemuan tingkat Menteri tersebut menghasilkan *G20 Digital Economy Ministerial Declaration* dan *G20 Roadmap on Digital Economy*. Deklarasi tersebut menyajikan perspektif menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi digital.

G20 Digital Economy Ministerial Meeting yang diselenggarakan pada tahun 2018 di bawah Presidensi Argentina menghasilkan *G20 Digital Economy Ministerial Declaration*. Deklarasi ini berfokus pada transformasi pemerintahan menuju *Digital Government*, pengukuran ekonomi digital untuk lebih memahami dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan, integrasi perempuan ke dalam ekonomi digital, pengembangan infrastruktur digital, pemanfaatan teknologi baru, pemanfaatan ekonomi digital bagi UMKM, dan perlindungan konsumen. Pertemuan menghasilkan

G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy dan G20 Digital Government Principles.

Pembahasan ekonomi digital di bawah Presidensi Jepang pada tahun 2019 menghasilkan *G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy*, yang berfokus pada *human-centered future society*: masyarakat yang mampu bertumbuh secara ekonomi dan menyelesaikan tantangan-tantangan sosial melalui melalui penyatuan antara dunia fisik dan virtual. Pernyataan Menteri juga menekankan pentingnya keamanan dan *trust*, inovasi pada pemerintahan, serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan inklusivitas.

Ekonomi digital menjadi salah satu agenda Presidensi Saudi Arabia pada tahun 2020 dengan diselenggarakannya *G20 Digital Economy Task Force Meeting* pada 1 dan 2 Februari 2020. Ekonomi digital diperkirakan akan menjadi suatu isu yang berkelanjutan dan akan diusung oleh Italia pada masa Presidensinya tahun 2021.

Ekonomi digital mempunyai pokok pembahasan yang sangat luas dan perlu dikerucutkan agar agenda yang dimajukan oleh Indonesia dapat memberikan nilai tambah dari pembahasan sebelumnya. Isu-isu yang dapat dibahas, antara lain, kesenjangan teknologi dan infrastruktur digital antara negara-negara maju dan berkembang yang menyebabkan persaingan dalam ekonomi digital berat sebelah dan tidak adil, perpajakan digital, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), *data free-flow with trust*, penyelesaian moratorium *e-commerce*, dan pembangunan infrastruktur pendukung digital ekonomi.

Isu ekonomi digital mempunyai kaitan yang erat dengan moratorium bea masuk *e-commerce* yang diberlakukan oleh WTO. *Norm setting* regulasi *e-commerce* dan ekonomi digital merupakan isu strategis yang dapat diusung sebagai salah satu agenda utama Presidensi G20 Indonesia.

Dalam pertemuan di Antalya, Turki, tahun 2015, Forum G20 pertama kali mengakui perlunya agenda pembangunan ekonomi digital. Inisiatif kerja sama dan pengembangan ekonomi digital baru muncul pada KTT Hangzhou pada September 2016. Di dalam dokumen *G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative*, disebutkan bahwa ekonomi digital melingkupi seluruh aktifitas ekonomi yang bersandar pada tiga hal yaitu pengetahuan dan informasi digital sebagai faktor kunci produksi; jejaring informasi modern sebagai ruang aktifitas penting dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi sebagai penggerak utama pertumbuhan dan optimalisasi struktur ekonomi.

Dalam KTT G20 di Hamburg, Jerman 2017 para pemimpin G20 menyepakati bahwa transformasi digital merupakan salah satu penggerak pertumbuhan global yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan. Para pemimpin juga menyepakati perlunya ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi digital serta penegakan aturan kompetisi yang efektif untuk mendukung inovasi dan investasi. Para pemimpin G20 juga berkomitmen untuk memajukan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan standar internasional yang berdasar prinsip keterbukaan, transparansi dan konsensus dan ditetapkan oleh industri dan pasar atas proses produksi barang dan jasa digital.

Namun demikian, standar internasional tersebut tidak boleh menjadi penghambat perdagangan, persaingan dan inovasi. Forum G20 juga menyatakan bahwa prinsip *trust* dalam teknologi digital memerlukan proteksi data konsumen yang efektif, HAKI, transparansi dan keamanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya G20 akan berperan konstruktif dalam diskusi WTO terkait dengan *e-commerce* dan berbagai forum internasional terkait ekonomi digital untuk mendorong pengembangan ekonomi dan perdagangan digital.

Deklarasi KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, tahun 2018 menyatakan bahwa para pemimpin G20 berkomitmen untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi dan perkembangan teknologi untuk pertumbuhan dan produktivitas yang inovatif. G20 akan meningkatkan promosi UMKM, menjembatani kesenjangan digital berbasis *gender*, meningkatkan inklusi digital, mendukung perlindungan konsumen serta memperbaiki tata kelola digital, infrastruktur digital dan pengukuran ekonomi digital. Para pemimpin G20 juga mengakui perlunya menangani isu keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

G20 mendukung kebebasan arus informasi, ide dan pengetahuan dengan memperhatikan kerangka hukum yang berlaku serta meningkatkan kepercayaan dan perlindungan data pribadi konsumen dan HAKI. Para pemimpin G20 menyambut baik adanya *G20 Repository of Digital Policies* untuk membagi pakai dan mempromosikan model bisnis ekonomi digital yang inovatif. G20 mengakui pentingnya hubungan antara perdagangan dan ekonomi digital serta akan meneruskan kerja sama di bidang kecerdasan

buatan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta *platform* bisnis baru.

Para pemimpin G20 dalam Deklarasi KTT G20 Osaka, Jepang, tahun 2019 menyatakan dukungan pada *G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy*. G20 akan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, aman, dapat dipercaya dan inovatif melalui digitalisasi dan penerapan teknologi yang sedang berkembang. Para pemimpin G20 mengakui peran penting pemanfaatan data sebagai faktor kunci pertumbuhan dan pengembangan ekonomi serta perbaikan kondisi masyarakat. G20 juga berkomitmen untuk mendorong diskusi kebijakan internasional untuk pemanfaatan penuh kekuatan potensial data.

Dalam KTT tersebut, G20 berkomitmen untuk mendukung proses arus data, informasi, ide dan pengetahuan lintas batas dan berkomitmen memperkuat kepercayaan bisnis dan konsumen. Arus data tersebut diyakini para pemimpin G20 akan menciptakan manfaat dalam dunia ekonomi digital. Selanjutnya G20 mendukung diskusi di bawah skema *Joint Statement Initiative on E-Commerce*, dan mengakui peran penting *Work Programme on E-Commerce* di WTO.

Selanjutnya para pemimpin G20 mendukung praktik baik dalam pelaksana kebijakan dan pendekatan regulasi termasuk ketentuan uji coba perusahaan rintisan di bidang keuangan digital (*regulatory sandbox*) dalam rangka promosi ekonomi digital. Selanjutnya para pemimpin G20 juga mengakui pentingnya peningkatan keamanan di bidang ekonomi digital untuk menanggulangi kerentanan dan kesenjangan keamanan. G20 juga mendorong berbagai tindakan perlindungan HAKI dan ekspansi teknologi dan diskusi terkait isu keamanan. Dalam KTT ini, para pemimpin meneruskan komitmen untuk menjembatani kesenjangan digital dan mendorong digitalisasi UMKM dan seluruh individu, terutama bagi kelompok rentan serta pengembangan dan kerja sama antar kota pintar.

Di samping itu, pemimpin 24 negara yang terdiri atas 17 negara anggota G20 kecuali India, Indonesia dan Afrika Selatan ditambah Spanyol, Chile, Belanda, Senegal, Singapura, Thailand, dan Viet Nam menyatakan *Osaka Declaration on Digital Economy* atau dikenal sebagai *Osaka Track* yang menekankan komitmen untuk mempromosikan diskusi kebijakan internasional antara lain penetapan norma *e-commerce* di WTO.

Dalam KTT G20 Virtual yang diselenggarakan Saudi Arabia tahun 2020, disepakati beberapa poin terkait ekonomi digital dalam Deklarasi Puncaknya. Para pemimpin G20 menyambut baik adanya *Policy Options to Support Digitalization of Business Models during COVID-19* dan mendukung lingkungan yang setara, adil dan terbuka, perlindungan dan penguatan konsumen serta mengakui tantangan terkait dengan perlindungan data pribadi, HAKI dan keamanan data. G20 mendukung adanya kerangka kerja hukum untuk memudahkan arus bebas data dan memperkuat kepercayaan konsumen dan bisnis. Para pemimpin juga berkomitmen untuk bekerjasama dalam mempercepat penetrasi internet global dan menjembatani kesenjangan digital.

Para pemimpin G20 selanjutnya menyambut baik adanya *G20 Examples of Practices Related to Security in the Digital Economy*. G20 juga meneruskan dukungan terhadap perkembangan kecerdasan buatan dengan menyambut baik adanya *the Examples of National Policies to Advance the G20 AI Principles* dan pengembangan kota dan masyarakat pintar melalui *G20 Smart Mobility Practices*. G20 juga menyambut baik adanya *the G20 Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy*.

Selain Deklarasi Puncak, forum G20 juga menyepakati berbagai komitmen terkait pengembangan ekonomi digital di tingkat menteri. Komitmen-komitmen dalam Pertemuan Tingkat Menteri bidang Ekonomi Digital disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Isu dan Komitmen Pertemuan Tingkat Menteri
Bidang Ekonomi Digital

No	Tahun	Isu dan Komitmen
1	PTM Ekonomi Digital, 6 – 7 April 2017, Düsseldorf, Jerman	1. Dukungan atas <i>G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative</i> yang dihasilkan dalam KTT G20 2016 Hanzhou, RRT. Menegaskan kembali komitmen terhadap <i>Connect 2020 Agenda</i> untuk menghubungkan 1,5 milyar orang pada tahun 2020 dan seluruh populasi pada tahun 2025 menurut kerangka pembangunan masing-masing;

	<p>2. Mendukung pengembangan teknologi komunikasi termasuk teknologi 5G dengan mempertimbangkan kondisi dan harmonisasi pembangunan komunikasi di masing-masing negara; dan</p> <p>3. Meningkatkan promosi keterampilan digital, termasuk di pelatihan kejuruan dan pemagangan, promosi literasi digital, pengurangan kesenjangan digital terkait gender, promosi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan kerja, bekerja secara konstruktif dalam diskusi-diskusi WTO terkait <i>e-commerce</i> dan dalam diskusi terkait <i>e-commerce</i> di forum internasional lainnya.</p> <p>Peta Jalan Digitalisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses global, penerapan dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif untuk semua; 2. Perluasan infrastruktur digital; 3. Penyesuaian kebijakan di tengah ekonomi global yang digerakkan pengetahuan dan informasi digital; 4. Perbaikan lingkungan kompetisi dalam ekonomi digital; 5. Dukungan terhadap UMKM dalam pemanfaatan digitalisasi sembari menangani tantangannya; 6. Mendorong pengembangan <i>internet of things</i> dan digitalisasi produksi; 7. Mendorong semua orang untuk dapat menyesuaikan diri dan terampil dalam ekonomi dan masyarakat digital; 8. Penguatan kepercayaan dalam ekonomi digital; 9. Penguatan perlindungan konsumen daring; 10. Pengukuran ekonomi digital; 11. Pembangunan jembatan kesenjangan digital berbasis gender
--	---

	<p>Keterampilan Digital dalam Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pengembangan kurikulum keterampilan digital dan teknologi pembelajaran digital; 2. Menemukanali keterampilan digital yang diperlukan, khususnya bagi UMKM; 3. Mempromosikan keterampilan kewirausahaan; 4. Mendorong pemangku kepentingan digital, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendesain program pemagangan keterampilan digital; 5. Penyediaan infrastruktur, kerangka kerja administratif dan sumber daya yang cukup bagi lembaga pendidikan; 6. Memanfaatkan potensi teknologi digital dan pembelajaran elektronik untuk meningkatkan hasil pembelajaran khususnya bagi kelompok rentan; 7. Menghilangkan kesenjangan digital berbasis <i>gender</i>; 8. Perbaikan kualifikasi guru dan pelatih melalui program pendidikan berkelanjutan; 9. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam peningkatan daya saing dan inovasi; 10. Memperkuat dialog antar pemangku kepentingan untuk pertukaran pengetahuan dan peluang pelatihan digital; dan 11. Meningkatkan jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan digital secara global. <p>Perdagangan Digital:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Perdagangan Digital: Negara anggota mendorong kerja sama berbagai lembaga statistik internasional dengan lembaga statistik nasional serta pelaku bisnis untuk mengembangkan sistem pelaporan ekonomi digital yang efisien;
--	---

		<p>2. Kerangka Kerja Perdagangan Digital Internasional: negara anggota terus mengikuti <i>G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative</i> dan bekerja secara konstruktif dalam diskusi-diskusi WTO terkait <i>e-commerce</i>. Lebih lanjut negara anggota G20 akan tetap bekerja secara pro-aktif dan konstruktif dalam diskusi di berbagai forum internasional terkait perdagangan digital; dan</p> <p>3. Pengakuan Dimensi Pembangunan dalam Perdagangan Digital: negara anggota menyadari bahwa terdapat ketidakseimbangan kapasitas di negara berkembang dan negara miskin terkait perdagangan digital, untuk itu negara anggota G20 berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi, penguatan kapasitas dan kerja sama untuk meningkatkan kemampuan dan partisipasi negara-negara miskin dalam perdagangan digital dan rantai pasok global.</p>
2	PTM Ekonomi Digital, 23 - 24 Agustus 2018, Salta, Argentina	<p>1. G20 sepakat untuk memajukan kebijakan dan tindakan yang menjadi katalis transformasi digital, untuk itu Presidensi G20 tahun ini akan diarahkan untuk promosi tata kelola dan infrastruktur digital, penguatan keterampilan digital angkatan kerja, pendalaman analisis pengukuran ekonomi digital, mengurangi kesenjangan digital berbasis gender, dan mendorong tukar pengalaman dan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM;</p> <p>2. G20 mendorong pemanfaatan teknologi digital terbaru;</p> <p>3. Para pemimpin menekankan pentingnya dukungan terhadap UMKM karena</p>

		<p>merekalah yang menyerap angkatan kerja yang cukup besar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. G20 sepakat untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pengembangan, pemanfaatan dan penerapan teknologi digital terbaru; 5. G20 mendorong negara anggota untuk: 1) mempromosikan inisiatif dalam pengembangan keterampilan digital dan kewirausahaan; 2) memperkuat ekosistem kompetisi dan akses pasar digital bagi pengembangan wirausaha dan UMKM; 3) mengembangkan kebijakan yang mendukung investasi, inovasi dan kepercayaan terhadap ekonomi digital dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, prediktif sekaligus melindungi data pribadi dan perusahaan; 6. G20 mendorong pemerataan pendidikan dan pelatihan digital, khususnya bagi kelompok rentan dan kelompok yang kurang terwakili (<i>under-represented</i>); dan 7. G20 berkomitmen untuk memberdayakan dan melindungi anak-anak dan kaum muda di era digital seraya mendorong langkah perbaikan kepercayaan, keamanan, perlindungan data. <p>Prinsip Tata Kelola Digital G20:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan pendekatan inklusi dan <i>user-driven</i> dalam tata kelola digital; 2. Promosi budaya keterbukaan dan <i>data-driven</i> di sektor publik; 3. Promosi kepercayaan dan keamanan untuk menjangkau potensi tata kelola digital melalui manajemen risiko; 4. Penguatan kesiapan pegawai pemerintah, warga negara dan pelaku bisnis bagi tata kelola digital;
--	--	---

	<p>5. Penegakan standar tata kelola digital berdasar prinsip keterbukaan, transparansi dan konsensus;</p> <p>6. Pengutamaan penganggaran (<i>funding</i>) dan implementasi strategi tata kelola digital; dan</p> <p>7. Penyusunan kerangka kerja pemilihan teknologi dan layanan digital yang akomodatif terhadap perkembangan lingkungan digital.</p> <hr/> <p>Penghapusan Kesenjangan Digital Berbasis Gender;</p> <p>1. Meningkatkan kesadaran kesenjangan digital berbasis <i>gender</i> dan penanganan hambatan partisipasi perempuan dalam ekonomi digital;</p> <p>2. Mendorong pengumpulan data yang bersifat <i>sex-disaggregated</i> dalam rangka intervensi yang berbasis bukti;</p> <p>3. Mempromosikan keterampilan digital bagi perempuan dan membantu mereka kembali ke pasar kerja sehingga menghindari hilangnya potensi ekonomi, sosial dan talenta;</p> <p>4. Menargetkan perempuan yang kurang memiliki akses dan penggunaan digital;</p> <p>5. Mendukung kewirausahaan perempuan dalam bisnis digital;</p> <p>6. Mendorong kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk memperkuat partisipasi dan ketertarikan perempuan pada sektor iptek dan matematika;</p> <p>7. Menangani kekerasan siber terhadap perempuan untuk mendukung partisipasi daring;</p> <p>8. Memanfaatkan alat digital yang meningkatkan peluang perempuan dalam mengurangi kesenjangan digital, memastikan pekerjaan yang baik dan lingkungan yang aman; dan</p>
--	---

		<p>9. Mendorong partisipasi negara anggota dan organisasi internasional dalam pembahasan inisiatif bersama terkait pemberdayaan perempuan dalam era digital.</p> <p>Pengukuran Ekonomi Digital:</p> <p>PTM mendorong pengembangan <i>G20 Toolkit for Measuring the Digital Economy</i> yang berisi metode dan 30 indikator pengukuran ekonomi digital. Indikator ini dibagi dalam 4 tema yaitu: 1) infrastruktur, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) inovasi dan penerapan teknologi, dan 4) lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Percepatan Infrastruktur Digital bagi Pembangunan:</p> <p>PTM berkomitmen untuk mendorong perbaikan proses perencanaan, penerapan dan pengendalian kebijakan publik terkait pengembangan infrastruktur digital dan pemerataan terhadap kelompok rentan dan minoritas. Kebijakan publik tersebut hendaknya juga mampu menciptakan iklim investasi yang baik dalam hal akses pasar dan keamanan. PTM juga mendorong kerjasama sektor publik dan swasta dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas fasilitas kredit.</p>
3	PTM Ekonomi Digital, 8 – 9 Juni 2019, Tsukuba, Jepang	<p>1. <i>Trustworthy Artificial Intelligence</i>: PTM berkomitmen untuk pengembangan kecerdasan buatan yang berpusat pada manusia, sesuai dengan <i>G20 AI Principles</i>.</p> <p>2. <i>Data Free Flow with Trust and Cross-border Data Flows</i>: PTM mengakui pentingnya arus data bebas yang akan meningkatkan produktifitas, inovasi dan pembangunan berkelanjutan seraya mengakui adanya tantangan berupa perlindungan data. Oleh karena itu, G20 akan terus mendorong tukar</p>

		<p>menukar pengalaman dan informasi terkait keamanan data serta berpartisipasi aktif dalam diskusi WTO terkait hal itu.</p> <p>3. <i>Smart Cities</i>: PTM mengakui bahwa mobilitas pintar merupakan salah satu elemen dalam pengembangan kota dan masyarakat pintar. Oleh karena itu, PTM menyambut baik praktek mobilitas pintar yang dikembangkan Presidensi G20 sebagai bahan praktek baik dan panduan pengembangan mobilitas pintar.</p> <p>4. <i>Measurement of the Digital Economy</i>: G20 menyambut penyusunan Peta Jalan G20 dalam pengukuran ekonomi digital dan berkomitmen meningkatkan kapasitas pengukuran statistik di antara negara anggota.</p> <p>5. <i>Security in the Digital Economy</i>: G20 menyadari pentingnya keamanan ekonomi digital, oleh karena itu, PTM menyambut baik penyusunan <i>G20 Examples of Practices Related to Security in the Digital Economy</i> dan pengembangannya di antara para pemangku kepentingan.</p>
4	PTM Virtual Ekonomi Digital, 20 April 2020 diselenggarakan Saudi Arabia	<p>1. Infrastruktur komunikasi dan konektivitas jejaring: G20 sepakat untuk bekerjasama dengan sektor swasta dan entitas bisnis untuk memaksimalkan konektivitas yang inklusif, aman dan terjangkau, khususnya di wilayah terpencil dan bagi kelompok rentan.</p> <p>2. Pertukaran data yang aman: G20 mendorong kolaborasi pengumpulan, pengolahan dan penggunaan bersama informasi non-pribadi yang akan berguna dalam penanganan pandemi COVID-19 dan penyakit lain sesuai dengan peraturan WHO. PTM juga berkomitmen untuk menangani isu bias data dan algoritma yang mungkin terjadi.</p>

	<p>3. Penelitian dan pengembangan teknologi digital untuk kesehatan: G20 berkomitmen untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang dikuasai untuk mempercepat proses pengembangan, pembuatan dan penyaluran obat dan vaksin. PTM menyambut pemanfaatan kecerdasan buatan dalam upaya ini. Lebih lanjut upaya litbang teknologi kesehatan digital hendaknya dilakukan secara <i>evidence-based</i> dan <i>human-centric</i>. G20 mendukung riset teknologi yang membantu para tenaga kesehatan, keluarga dan masyarakat serta yang mendukung upaya tanggap darurat.</p> <p>4. Pemanfaatan teknologi dan solusi digital: G20 mendorong kolaborasi teknologi digital yang <i>evidence-based</i>, <i>trustworthy</i>, dan <i>human-centric</i> untuk meningkatkan partisipasi individu dan perusahaan dalam ekonomi digital seraya menekankan pentingnya keamanan, perlindungan pribadi dan HAM. PTM berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keterampilan digital melalui proses pendidikan dan pelatihan di sekolah, perguruan tinggi maupun di perusahaan. G20 mendorong pemanfaatan alat pengaman yang memudahkan kerja dan belajar jarak jauh untuk mendukung keberlangsungan aktifitas ekonomi dan sosial. PTM juga mendorong kolaborasi komunitas ilmiah, sektor swasta, dan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi dan solusi digital dalam penanggulangan COVID-19 dan penyakit menular lainnya.</p> <p>5. Lingkungan daring yang aman dan terpercaya: G20 mendukung proses pertukaran pengalaman terkait dengan penanganan serangan siber yang berbahaya. G20 juga mendorong para pemangku kepentingan digital untuk</p>
--	---

		<p>bertukar informasi yang terpercaya untuk memerangi disinformasi, hoaks, penipuan daring seraya menghormati prinsip kebebasan berpendapat. G20 juga berupaya untuk merekrut petugas komunikasi krisis di saluran digital yang andal.</p> <p>6. Ketahanan ekonomi: G20 mendorong UMKM meningkatkan pengetahuan teknologi dan solusi digital dalam aktivitas bisnis untuk mempertahankan rantai pasok global. G20 juga mendorong model bisnis digital baru baik dalam proses produksi, transaksi maupun distribusi, untuk itu Presidensi G20 Saudi akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan opsi kebijakan bagi negara anggota.</p> <p>7. G20 mendorong pertukaran informasi antar anggota terkait intervensi kebijakan praktek baik, <i>lesson learned</i> dan solusi ekonomi digital dalam penanganan COVID-19. <i>The Digital Economy Task Force</i> akan mendorong diseminasi alat digital dalam penanganan pandemi COVID-19.</p>
--	--	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber antara lain *G20 Leaders' Declaration* dan *G20 Digital Economy Ministers Meeting Ministerial Declaration*

2.2 Pemetaan Aliansi Diplomasi Ekonomi Digital Indonesia

2.2.1 Cross-Border Data Flows

Keinginan mayoritas anggota G20 untuk mendorong konsensus tentang *cross-border data flows* didasarkan pada urgensi bahwa aturan internasional yang ada tidak memadai untuk melindungi data sensitif dengan hati-hati, sekaligus mengizinkan dan secara efektif mengatur aliran data lintas batas negara. Konsep yang dicetuskan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe saat Presidensi G20 Jepang dalam *Osaka Declaration* yang sering dikenal sebagai konsep *Data Free Flow with Trust* (DFFT). Indonesia bersama India dan Afrika Selatan menjadi 3 (tiga) negara yang tidak menandatangani *Osaka*

Declaration. Sikap Indonesia tersebut disebabkan belum jelasnya rumusan kepentingan domestik terhadap isu *cross-border data flows*. Akibatnya, Indonesia tampaknya kurang berkontribusi dalam penetapan tatanan arus data lintas batas yang bersifat global.

Kepentingan Indonesia terkait aliran data lintas batas terletak pada kedaulatan dan keamanan data nasional, serta kelancaran arus investasi di bidang ekonomi digital. Pada *G20 Digital Economy Ministers Meeting* tanggal 22 Juli 2020, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI Indonesia, Johnny G. Plate, menilai bahwa konsep DFFT tidak cukup untuk melingkupi aturan mengenai tata kelola data yang bersifat global secara komprehensif. Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan penambahan agenda *Cross Border Data Flows*. Usulan Indonesia diterima dan diadopsi dalam *G20 Ministerial Declaration on Digital Economy* menjadi “*Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flows*”.

Perkembangan positif yang dialami oleh Indonesia dalam keterlibatannya untuk merumuskan aturan global mengenai aliran data lintas batas ini merupakan tonggak penting yang menopang perjalanan Indonesia menuju Presidensi G20 Indonesia. Indonesia perlu mendefinisikan kepentingan nasional dan menerjemahkan kepentingan tersebut dalam *outcome document* sebagai komitmen bersama negara-negara G20.

Indonesia telah merumuskan sejumlah norma yang perlu diadopsi dalam aturan global mengenai aliran data lintas batas yakni *lawfulness*, *fairness*, dan *transparency* serta *reciprocity*. Menkominfo RI (Kemenkominfo, 2020) menjelaskan:

- a. Norma *lawfulness*, “Indonesia menekankan pentingnya proses pertukaran data didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya”;
- b. Norma *fairness*, Indonesia menilai bahwa “pertukaran data harus memiliki tujuan yang valid”;
- c. Dalam konteks norma *transparency*, Indonesia “menekankan pentingnya komunikasi dan informasi tentang pemrosesan data yang terbuka, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh para pemilik data”; dan
- d. Norma resiprositas berpijak pada pemikiran bahwa “proses transfer data dapat dilakukan jika negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi, Pemroses Data Pribadi, atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan yang setara atau lebih

tinggi dari yang diatur dalam undang-undang negara asal atau jika terdapat perjanjian internasional antarnegara.”

Penciptaan norma internasional baru tidaklah mudah dan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk dapat mempengaruhi tatanan internasional, antara lain: (i) legitimasi; (ii) prominensi; (iii) nilai intristik dari norma; (iv) kedekatan dengan norma yang ada; dan (v) keadaan sekitar munculnya norma baru.² Norma-norma yang diusulkan oleh Indonesia telah memenuhi persyaratan dimaksud dan dapat dikatakan sebagai perpanjangan dari norma yang ada dalam tatanan internasional. Konsep *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, dan *reciprocity* dalam aliran data lintas batas yang diadopsi oleh Indonesia dapat ditemukan dalam *General Data Protection Regulation* yang dimiliki oleh Uni Eropa (UE).

Oleh karena itu, Indonesia harus menekankan bahwa norma-norma baru yang diusulkan tidak bermaksud untuk menggantikan norma-norma internasional yang ada, melainkan merupakan upaya untuk mengelaborasi norma-norma yang sudah ada dengan mengambil posisi yang hampir sama dengan UE. Oleh karena itu, jika Indonesia bisa mempromosikan keempat norma tersebut secara strategis, peluang adopsi norma *lawfulness*, *fairness*, dan *transparency* serta *reciprocity* dalam aturan global aliran data lintas batas cukup besar.

Agar norma tersebut dapat diadopsi oleh G20, Indonesia perlu membangun aliansi jangka panjang dengan sejumlah negara yang dipetakan sebagai berikut:

Tabel 2
Potensi Aliansi Isu Aliran Data Lintas Batas

Kepentingan Indonesia	Negara G20	Rekomendasi Kebijakan
- Indonesia memiliki	- Indonesia perlu	- Indonesia melalui

² Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. “International Norm Dynamics and Political Change.” *International Organization* 52 (4): 887–917. Diakses at <https://j.mp/2E0Ha5u> tanggal 28 Desember 2020

<p>kepentingan untuk menjembatani aspirasi kedaulatan dan keamanan data dengan aspirasi menjamin kelancaran arus investasi ekonomi digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal ini diterjemahkan dengan promosi norma <i>lawfulness, fairness, transparency</i> dan <i>reciprocity</i> dalam forum G20. - Keempat norma ekonomi digital yang diangkat oleh Indonesia akan dimanifestasikan dalam sebuah dokumen mengenai protokol arus data internasional yang diharapkan bisa disepakati saat Presidensi Indonesia di G20. 	<p>membangun aliansi dengan negara G20 yang memiliki kesamaan kepentingan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Uni Eropa (UE) o Tiongkok o India o Rusia <ul style="list-style-type: none"> - UE, Tiongkok, dan Rusia merupakan <i>great powers</i> dan <i>normative powers</i> yang dapat mendukung legitimasi norma-norma <i>cross-border data flows</i> yang digagas Indonesia. - Selain itu, India adalah <i>middle power</i> dan <i>developing country</i> yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam ekonomi digital dengan Indonesia. - Dan negara-negara yang memiliki kesamaan identitas seperti: <ul style="list-style-type: none"> o Meksiko o Korea Selatan o Turki o Australia 	<p>Kemenkominfo perlu menyelaraskan langkah dengan UE selaku pionir keempat norma ekonomi digital tersebut mengingat prominensi UE sebagai <i>normative power</i> dalam politik global.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang lebih intensif perlu dilakukan dengan India sebagai negara kunci karena India dan Indonesia memiliki kepentingan yang sama sebagai negara berkembang dan <i>middle power</i> serta posisi India yang menjabat Presidensi G20 India tahun 2023 agar dapat meneruskan upaya <i>norm-setting</i> yang telah dilakukan Indonesia.
---	---	---

Agar pijakan Indonesia ini semakin kokoh dalam perundingan di G20 tentang aliran data lintas batas, Indonesia perlu untuk mengesahkan kebijakan di tingkat domestik. Dalam hal ini, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Peraturan Menteri mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (RPM PSELV) perlu segera diselesaikan agar Indonesia memiliki kebijakan yang resmi terkait aliran data lintas batas. Hal ini terkait dengan poin kesebelas *G20 Digital Economy Ministerial Declaration 2020* yang menekankan pentingnya keselarasan aliran data lintas batas dengan tujuan kebijakan publik dan kerangka hukum yang relevan di tiap negara.

2.2.2 Desentralisasi Norma Inovasi di Forum G20

Saat ini, diskursus Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di forum multilateral terpolarisasi oleh hegemoni prioritas atas HAKI di satu sisi dan tuntutan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) di sisi lain. Dengan pertimbangan kepentingan untuk melindungi HAKI industri ekonomi digital domestik dan perlunya memperoleh akses terhadap teknologi, Indonesia memiliki peluang untuk menjembatani pandangan yang terpolarisasi tentang HAKI dengan menghadirkan alternatif norma “desentralistik” yang didasari pengakuan bahwa perlindungan HAKI dan distribusi keahlian teknis dan pengetahuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi digital. Norma inovasi cenderung bersifat desentralistik penerapannya dapat disesuaikan dengan kepentingan nasional masing-masing anggota G20.

Perdebatan HAKI yang berjalan di tingkat internasional selama ini menciptakan polarisasi yang tak seimbang bagi kepentingan Indonesia untuk pembangunan ekosistem digital. Indonesia bisa mencoba mengarahkan diskusi HAKI untuk dapat sejalan dengan kepentingan Indonesia yakni perlindungan bagi kreator domestik.

HAKI merupakan komponen yang penting bagi para kreator untuk dapat mengkapitalisasi karya yang dihasilkan dan melindungi HAKI karya tersebut. Optimalisasi perlindungan HAKI diperlukan untuk memotivasi para kreator Indonesia untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk-produk yang dapat berkompetisi di pasar digital dunia. Dengan ditingkatkannya *output* inovasi dan produk oleh para kreator, Indonesia dapat mengubah partisipasi yang cenderung konsumtif menjadi lebih produktif.

Upaya ini sebetulnya telah dibangun oleh Kementerian Luar Negeri pada Presidensi Indonesia di forum *Committee on Development and Intellectual Property* tahun 2019. Saat itu, Indonesia, mencapai kesepakatan 3 (tiga) topik agenda untuk membahas: (a) “*IP and Development*” periode 2020 – 2021 terkait *IP and Technology Support Centers*; (b) *IP and Innovation for Entrepreneurs*, dan (c) *IP Commercialization and Technology Transfer* (PTRI Jenewa, 2019).

Selain itu, Indonesia bersama Meksiko, Korea Selatan, Turki dan Australia berhasil memasukkan agenda yang bertema tema “Kekayaan Intelektual dan Inovasi untuk UMKM” untuk mendorong arah pembicaraan HAKI yang seimbang antara negara maju dan berkembang. Khususnya dalam konteks industri kreatif, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengajukan proposal ke WIPO terkait pemanfaatan HAKI untuk membangun industri kreatif di era ekonomi digital. Meskipun ekonomi kreatif belum dilihat sebagai agenda yang kuat di tingkat multilateral, isu ini memiliki potensi untuk menjadi basis aliansi dengan negara-negara Arab yang mempunyai prioritas untuk diversifikasi ekonomi.

Tabel 3
Potensi Aliansi Isu HAKI Digital

Kepentingan Indonesia	Negara G20	Leading Sector
Optimalisasi HAKI bagi Produk Ekonomi Kreatif (EK)	<ul style="list-style-type: none"> - MIKTA: Bekerja sama dengan Indonesia untuk mendorong agenda pembahasan terkait optimalisasi HAKI bagi produk UMKM di CDIP. - Arab Saudi: Memiliki kepentingan untuk diversifikasi ekonomi melalui produk-produk EK. - Brazil dan Argentina: Mengajukan rancangan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemlu: Membangun pembahasan dan kerjasama terkait HAKI bagi produk EK di forum-forum internasional. b. Kemenparekraf: Sosialisasi serta pendampingan ke para kreator untuk pemanfaatan HAKI. c. BRIN:

	<p>proposal ke WTO untuk melindungi hak-hak pelaku EK dalam sistem HAKI yang transparan.</p>	<p>Mendorong inisiatif inovasi bagi sektor Agrikultur dan Kesehatan.</p>
<p>Literasi Digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jerman: Membawa agenda literasi digital dan adopsi kemampuan digital dalam pendidikan dan pelatihan vokasi pada KTT G20 2017. - Argentina: Menempatkan literasi digital sebagai prioritas dan adopsi <i>digital skills</i> sebagai salah satu prinsip dari <i>Digital Government</i> pada KTT G20 2018. 	<p>Kominfo: Mendorong pembahasan dan skema penerapan literasi digital di negara-negara berkembang. Menginisiasi kerja sama penerapan literasi digital dengan <i>tech-company</i> dan organisasi sipil di dalam maupun di luar negeri.</p>
<p>Transfer Teknologi dan Pengetahuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data oleh <i>G20 Digital Economy Task Force</i> (DETF) dalam periode 2014 hingga 2016, 60% dari total paten <i>artificial intelligence</i> (AI) seluruh dunia dikuasai oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Tetapi, ketiga negara tersebut menentang adanya skema transfer teknologi dan secara bersamaan mendorong perluasan HAKI dalam 	<p>Kemendag: Mempertahankan fleksibilitas terkait akses terhadap pengetahuan dan teknologi pada JSI on <i>E-Commerce</i> oleh WTO.</p> <p>Kominfo: Menjalin kerja sama dengan negara-negara aliansi dan <i>multinational tech-company</i> untuk transfer teknologi.</p>

	<p>diskusi ekonomi digital di forum multilateral lainnya. Dengan demikian, aliansi dapat dijalin dengan negara-negara dengan kepentingan serupa, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Brazil dan Argentina: Menekan fleksibilitas pada HAKI di era ekonomi digital. Perluasan terhadap klausa limitasi dan pengecualian untuk melindungi akses terhadap teknologi; ○ India dan Afrika Selatan: Menuntut adanya <i>policy space</i> di level internasional untuk agenda pembangunan domestik; dan ○ Tiongkok: Menempatkan transfer teknologi di posisi yang sejajar dengan perlindungan HAKI pada <i>G20 Innovation Action Plan</i> di KTT G20 2016. 	
--	---	--

Upaya diplomasi Indonesia perlu diikuti dengan rumusan kebijakan HAKI sebelum isu HAKI diangkat saat Presidensi Indonesia di G20 mengingat rekam jejak perlindungan HAKI Indonesia yang kurang cukup baik di tingkat nasional maupun internasional.

Representasi dari asosiasi *e-commerce* Indonesia mengusulkan beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum mengangkat HAKI sebagai agenda prioritas G20, yaitu: (i) mendorong masyarakat untuk berinovasi dan mematenkan hasil inovasinya sehingga dapat terlindungi; (ii) memaksimalkan potensi-potensi SDM Indonesia yang bisa menjadi keunggulan di pasar digital dunia, misalnya di sektor agrikultur and kesehatan dengan dukungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan (iii) memaksimalkan peran negara tidak lagi sebagai regulator ataupun fasilitator, tetapi *accelerator* yang mendampingi para kreator dari produksi, paten, hingga pemasaran.

2.2.3 Pajak Digital *E-Commerce* dan Moratorium *E-Commerce*

Metode-metode pengiriman barang dan jasa elektronik seperti *e-book* dan perangkat lunak mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Pesatnya pertumbuhan dan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam aktivitas perdagangan menimbulkan perdebatan di *World Trade Organization (WTO)* terkait definisi dan posisi metode-metode perdagangan elektronik tersebut (*e-commerce*) dalam tata aturan dan regulasi WTO yang berlaku. Pada saat itu, negara-negara anggota WTO tidak menganggap kegiatan *e-commerce* sebagai impor dan, oleh sebab itu, tidak dinilai perlu memberlakukan bea masuk. Amerika Serikat mengusulkan untuk menyusun praktik regulasi *e-commerce* di WTO untuk melindungi industri perangkat lunaknya.

Pada bulan Mei 1998, negara-negara anggota WTO sepakat untuk mengadopsi "*Declaration on Global Electronic Commerce*", yang terdiri dari: (i) merancang program kerja yang komprehensif untuk mengkaji permasalahan perdagangan, khususnya dalam kaitan perdagangan elektronik global, dengan mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang; dan (ii) komitmen untuk tidak mengenakan bea masuk pada *e-commerce*, untuk dipertimbangkan kembali pada *ministerial meeting* yang dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. *Ministerial Meeting* yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2019 memutuskan untuk terus memberlakukan moratorium pemberlakuan bea masuk *e-commerce*.

Moratorium *e-commerce* WTO dinilai merugikan produsen dan pemasok dalam negeri serta berpotensi menghalangi pertumbuhan *digital industry* yang baru mulai tumbuh di negara-negara berkembang. Produk digital dan penyedia layanan digital membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara produsen asing tidak membayar bea masuk atau PPN. Karena kerugian dari segi perpajakan ini bagi perusahaan dalam negeri, moratorium

e-commerce berakibat kepada *off-shoring* perusahaan digital yang berdampak kepada penurunan pendapatan pajak dalam negeri dan hilangnya lapangan kerja.

Kesenjangan teknologi dan infrastruktur digital antara negara-negara maju dan berkembang perlu mendapat perhatian khusus. Pelaku ekonomi digital di negara berkembang dinilai belum memiliki kapasitas, baik dari segi pendanaan, investasi, sumber daya manusia, dan aset, untuk langsung bersaing dengan perusahaan-perusahaan digital yang sudah mapan di negara maju. Persaingan dalam ekonomi digital antara negara maju dan negara berkembang dinilai berat sebelah dan tidak adil.

Beberapa negara berkembang yang merupakan *net importer* produk digital seperti Afrika Selatan dan India telah beberapa kali menyatakan keberatan terhadap perpanjangan moratorium *e-commerce* yang berdampak negatif kepada pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri dan *revenue loss* bea masuk bagi negara berkembang yang diperkirakan mencapai 10 milyar Dolar AS per tahun.

Dua puluh tahun setelah *Declaration on Global Electronic Commerce* diadopsi, pesatnya perkembangan IT menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu kontributor yang cukup signifikan kepada *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 40 miliar Dolar AS pada 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 49% per tahun. Ekonomi digital memberikan kontribusi sebesar 2.9% kepada GDP Indonesia pada 2019, khususnya di bidang *e-commerce* dan *ride-hailing application*. Diperkirakan nilai *digital industry* Indonesia akan mencapai 130 miliar Dolar AS pada 2025 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Mengingat pesatnya pertumbuhan dan potensi ekonomi digital Indonesia, kiranya diperlukan adanya kajian mengenai posisi Indonesia terhadap moratorium bea masuk *e-commerce* yang diterapkan oleh WTO. Pemberlakuan bea masuk dan pajak pada transaksi elektronik akan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyeimbangkan kompetisi antara penyedia layanan elektronik dalam negeri dan luar negeri.

Kiranya dapat dilakukan peninjauan dengan *like-minded developing countries* di G20, seperti India, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Afrika Selatan,

untuk dapat bersama-sama mengusung *norm-setting* kerja sama internasional dan regulasi transaksi elektronik sebagai salah satu agenda utama di G20.

Manfaat yang diberikan *e-commerce*, antara lain, dapat meningkatkan permintaan pasar, konsumsi produk, dan *output* industri. Sedangkan, persaingan antara *e-commerce* dan industri *retail* konvensional tidak berimbang karena *e-commerce* tidak memerlukan perizinan, pengawasan, dan membayar pajak seperti industri *retail* konvensional.

Supplier pelaku usaha *e-commerce*, baik impor maupun produsen dalam negeri, tidak dapat dilacak dan mempunyai kemungkinan merugikan industri dalam negeri, khususnya di bidang tekstil, kerajinan, dan alas kaki. Dengan demikian, *e-commerce* perlu diregulasi untuk menciptakan persaingan yang sehat bagi seluruh pelaku usaha, baik elektronik maupun konvensional.

Regulasi transaksi elektronik di Indonesia didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017 – 2019. Beberapa hal yang tercakup dalam *roadmap* Perpres tersebut adalah: (i) pendanaan; (ii) perpajakan; (iii) perlindungan konsumen; (iv) pendidikan dan SDM; (v) infrastruktur komunikasi; (vi) logistik; dan (vii) keamanan siber (*cyber security*).

Perpres No.74/2017 ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang lebih jauh mengatur transaksi elektronik, antara lain: (i) izin usaha, izin teknis; (ii) Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (iii) kode etik bisnis (*business conduct*); dan (iv) standardisasi produk barang dan/atau jasa. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menyeimbangkan kompetisi antara pelaku usaha PMSE dan industri *retail* konvensional. Standardisasi produk barang diharapkan dapat mendorong pelaku usaha PMSE untuk mendapatkan suplai dari produsen dalam negeri dan tidak bergantung kepada impor.

Dalam Siaran Pers Siaran Pers No. SP-21/2020 tanggal 15 Mei 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengemukakan bahwa pemungutan PPN PMSE bertujuan untuk menciptakan *level playing field* antara pelaku usaha domestik dan asing yang melakukan penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP melalui perdagangan melalui sistem elektronik. Pemungutan PPN PMSE didasarkan pada argumen bahwa dalam hal pemenuhan kewajiban

perpajakan, ada ketidaksetaraan antara pelaku-pelaku usaha di atas. Secara spesifik, pajak tersebut dipungut untuk memastikan bahwa pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP seperti *streaming* musik dan film, *online advertising*, serta *online marketplace* akan dikenakan beban pajak yang setara (proporsional).

Dalam pemungutan PPN terhadap transaksi digital ini, tidak ada persoalan berarti karena secara prinsip sudah disepakati bahwa pengenaan PPN atas konsumsi yang dilakukan di dalam negeri mengacu pada prinsip destinasi (*destination principle*) tanpa melihat dari mana barang dan/atau jasa tersebut berasal.

Dalam meningkatkan penerimaan negara dan mendorong *level of playing field* di dalam isu perpajakan digital, khususnya pajak penghasilan, Indonesia berencana tetap mengenakan pajak penghasilan atau pajak transaksi elektronik (PTE) terhadap pelaku-pelaku usaha asing dengan berpegang pada Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Posisi tersebut diambil Indonesia terlepas dari hasil apapun yang terjadi terhadap pembahasan konsensus global di OECD/G20 *Inclusive Framework on BEPS*, dan ini juga sudah dikonfirmasi Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Kementerian Keuangan. Walaupun begitu, Indonesia tetap perlu beradaptasi dan mengikuti perkembangan diskursus pajak digital internasional melalui forum G20 maupun OECD.

Dalam konteks global, belum ada konsensus yang diraih dalam diskusi forum OECD. OECD sendiri memberikan ruang bagi otoritas pajak suatu negara untuk memberlakukan kebijakan unilateral, contohnya prinsip kehadiran ekonomi signifikan yang diberlakukan Israel dan Indonesia, *equalization levy* di India, *diverted profit tax* di Inggris dan Australia, dan *digital service tax* (DST) di Uni Eropa (UE), Kanada, Meksiko, Brazil dan Turki. Pada Oktober 2019, OECD menerbitkan proposal "*unified approach*" dengan harapan konsensus global dapat dicapai pada akhir 2020 untuk memberikan otoritas dan hak pemajakan baru bagi negara pasar tanpa berdasar pada keberadaan fisik (*physical presence*).

Tabel 4
Posisi Negara G20 untuk Pajak dan Bea Masuk Barang Digital

No	Negara	Posisi Negara G20	
		Pajak Digital (<i>Direct Tax</i>) <i>Update per September 2020</i>	Bea Masuk Barang Digital
1	Argentina	Mengikuti pembahasan global (IF BEPS)	N.A
2	Australia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Menyiapkan tindakan unilateral (<i>Multinational Anti-Tax Avoidance Law/MAAL</i>) - Menteri Keuangan Australia telah mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan bahwa Australia tidak akan melanjutkan <i>interim measure</i> untuk perpajakan ekonomi digital 	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen
3	Brazil	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Menyiapkan tindakan unilateral (CIDE-digital) 	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen
4	Kanada	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) 	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen

		- Menyiapkan tindakan unilateral (<i>Digital Services Tax</i>)	
5	China	Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS)	Mendukung Moratorium masih diteruskan.
6	Perancis	- Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Memberlakukan tindakan unilateral (<i>Digital Services Tax</i>)	N.A
7	Jerman	- Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Kementerian Keuangan Federal Jerman dan Kementerian Keuangan negara bagian Jerman telah memutuskan bahwa pemotongan pajak (<i>withholding tax</i>) tidak boleh dikenakan pada layanan iklan digital	N.A
8	India	- Mengikuti pembahasan konsensus global - Memberlakukan tindakan unilateral (<i>Equalization Levy</i>)	Menghendaki pencabutan Moratorium
9	Indonesia	- Mengikuti pembahasan konsensus global dan - Mengimplementasikan tindakan unilateral (Pajak Transaksi Elektronik)	Menghendaki pencabutan Moratorium

10	Italia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Mengimplementasikan tindakan unilateral (<i>Digital Services Tax</i>) 	N.A
11	Jepang	Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS)	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen
12	Meksiko	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Mengimplementasikan tindakan unilateral (<i>Withholding Tax</i>) 	N.A
13	Rusia	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Mempertimbangkan tindakan unilateral (<i>Withholding Tax</i>) 	N.A
14	Arab Saudi	Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS)	N.A
15	Afrika Selatan	Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS)	Menghendaki pencabutan Moratorium
16	Korea Selatan	Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS)	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen
17	Turki	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Mengimplementasikan tindakan unilateral (<i>Withholding Tax/DST</i>) 	N.A
18	Inggris	- Mendukung adanya konsensus global	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen

		- Mengimplementasikan tindakan unilateral (<i>Diverted Profit Tax/DST</i>)	
19	Amerika Serikat	- Berhenti mengikuti pembahasan konsensus global (IF BEPS) - Menolak tindakan unilateral	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen
20	Uni Eropa	- Mengikuti pembahasan konsensus global - Menyiapkan tindakan unilateral (<i>Digital Services Tax</i>)	Menghendaki Moratorium menjadi Permanen

Tabel 5
Kepentingan Indonesia dan Negara G20
Pajak Digital dan Bea Masuk Barang Digital

Kepentingan Indonesia	Negara G20	Rekomendasi
Pajak Digital: Indonesia akan tetap mengenakan pajak atas transaksi elektronik, dengan asas <i>level playing field</i>	Brazil, Kanada, Perancis, India, Italia, Meksiko, Rusia, Turki, Inggris, Uni Eropa	Indonesia beradaptasi terhadap perkembangan diskursus pajak digital internasional dan mengadopsi dua skenario dalam Presidensi G20 di 2022: Skenario 1: Jika terjadi konsensus sebelum 2022, maka mengikuti pendekatan multilateralisme

		<p>Skenario 2: Jika tidak ada konsensus sebelum 2022, maka mengikuti <i>unilateral approach</i>.</p> <p>Leading Sector: Kementerian Keuangan</p>
<p>Customs Duties: Indonesia ingin menolak adanya moratorium atas bea masuk produk digital. Indonesia ingin ada <i>policy space</i> atas <i>customs duties</i>.</p>	India dan Afrika Selatan	<p>Mengajukan agenda tentatif di G20 tentang moratorium e-commerce dengan posisi untuk menolak moratorium untuk menjadi permanen</p> <p>Leading Sector: Kementerian Perdagangan</p>

BAB III

PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu dari 7 Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda Pembangunan ini diturunkan dari Misi Presiden untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dan Arahan Presiden terkait pembangunan SDM. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dilakukan melalui: (i) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (ii) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (iii) peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (iv) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (v) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (vi) pengentasan kemiskinan; dan (vii) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Prioritisasi isu peningkatan kualitas dan daya saing SDM tidak lepas dari kondisi daya saing SDM Indonesia yang masih relatif rendah. Menurut data *The Global Competitiveness Report* dari *World Economic Forum 2019*, Indonesia menduduki peringkat 50 dengan skor 64,6.³ Posisi ini berada di bawah sebagian besar anggota G20 yang lain. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan (peringkat 60), Turki (peringkat 61), India (peringkat 68), dan Argentina (peringkat 83).

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia menempati peringkat 111 dari 189 negara yang dinilai.⁴ Posisi ini hanya lebih baik dari Afrika Selatan (peringkat 113) dan India (peringkat 129). Terkait pendidikan, kondisi pendidikan di Indonesia masih perlu banyak peningkatan. Di Indonesia, populasi penduduk yang menyelesaikan sekolah menengah hanya 35% dari seluruh penduduk. Pengangguran masih banyak dialami kalangan pemuda di Indonesia, dengan tingkat pengangguran pemuda mencapai lebih dari 10% di 2017.

³ *World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019.*

⁴ *United Nations Development Programme, Human Development Report 2019.*

Dari aspek pengetahuan, teknologi, dan kesiapan masa depan (*future readiness*) menurut penelitian dari *IMD World Competitiveness Center*, Indonesia belum menunjukkan peringkat yang memuaskan pada era digital. Pada *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020*, Indonesia menempati peringkat 56 dari 63 negara yang diteliti dengan skor 50,075⁵. Peringkat tersebut tidak berubah dari peringkat sebelumnya pada 2019. Skor yang diperoleh Indonesia tersebut hanya lebih baik dari Argentina di peringkat 59 dengan skor 48,784 dan Afrika Selatan di peringkat 60 dengan skor 48,353. Peringkat Indonesia masih tetap di bawah beberapa *emerging economies* anggota G20, antara lain, Korea Selatan, Tiongkok, Arab Saudi, dan India selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Seiring dengan kesempatan Presidensi G20 Indonesia, isu strategis peningkatan daya saing dan produktivitas SDM dapat diangkat sebagai salah satu agenda prioritas Indonesia sesuai kepentingan nasional. Isu strategis tersebut sejalan dengan pembahasan di berbagai kelompok kerja G20, antara lain, bidang ketenagakerjaan, SDM, dan pendidikan.

3.1 Perkembangan Pembahasan Isu Ketenagakerjaan, Sumber Daya Manusia, dan Pendidikan

Isu ketenagakerjaan, SDM, dan pendidikan merupakan isu-isu penting dalam G20 yang dibahas dalam 3 (tiga) *Working Group*, yaitu: (i) *Employment Working Group* (EWG) yang fokus pada isu ketenagakerjaan; (ii) *Development Working Group* (DWG) yang memasukkan isu SDM sebagai salah satu prioritasnya; dan (iii) *Education Working Group* (EdWG) yang berfokus pada isu pendidikan.

EWG awalnya lahir sebagai *Task Force Employment* (TFE) pada saat Presidensi Perancis tahun 2012. Sejak Presidensi Turki tahun 2015, dibentuk EWG yang diikuti oleh kementerian yang terkait dalam pengambilan kebijakan dan program di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan.

DWG dibentuk tahun 2010 dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, serta untuk mengatasi isu-isu

⁵ *IMD World Competitiveness Center, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020.*

kesenjangan dan kemiskinan yang dialami oleh negara-negara berkembang, *least developed countries* (LDCs), dan negara-negara Afrika.

Pada awalnya, terdapat 6 prinsip DWG yang dijabarkan pada *Seoul Development Consensus for Shared Growth* tahun 2010, yaitu: (i) fokus pada pertumbuhan ekonomi; (ii) kemitraan pembangunan global (prioritas kerja sama ditekankan pada sektor yang menjadi katalis dalam kerangka kerja sama *North-South*); (iii) isu sistemik global dan regional (menghindari pandangan yang *state-centric*); (iv) melibatkan partisipasi pihak swasta sebagai kontributor ilmu pengetahuan dan lapangan pekerjaan untuk pertumbuhan yang inklusif; (v) menghindari duplikasi; dan (vi) orientasi pada hasil yang dapat dimonitor dan diukur perkembangannya. Isu mengenai pengembangan SDM kemudian menjadi salah satu dari 9 ruang lingkup DWG sesuai *Seoul Multi-Year Action Plan on Development 2010*.

Pada tahun 2015, dengan disepakatinya Agenda 2030 dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), maka poin-poin SDGs masuk dalam ruang lingkup DWG. Dari 9 ruang lingkup, DWG telah dikembangkan untuk mencakup 15 ruang lingkup termasuk dimensi kehidupan manusia secara komprehensif. Isu SDM menjadi salah satu isu dengan jumlah komitmen paling banyak (11 komitmen) dan secara konsisten dibahas dalam DWG.

EdWG dibentuk pada 2018 di bawah Presidensi Argentina. Tema-tema yang dibahas EdWG meliputi: (i) *Skills for life and work*; dan (ii) *Financing education and international cooperation*. Prioritas juga ditujukan pada kelompok-kelompok rentan dan kurang terwakili, serta penanganan ketimpangan melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang menjamin peluang yang setara bagi semua kelompok. Di bawah Presidensi Arab Saudi beberapa isu prioritas EdWG adalah *Early Childhood Education* (ECE/pendidikan anak usia dini), *Internationalization in Education*, dan *Education Continuity*.

3.1.1 Pembahasan Isu Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang penting dibahas dalam G20 karena keterkaitannya dengan pemenuhan mandat utama G20, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan standar kehidupan, dan pertumbuhan kelas menengah global.

Namun, di negara-negara G20, pengangguran masih banyak ditemukan. Menurut data dari OECD dan Bank Dunia, pada 2005 hingga 2019, rata-rata angka pengangguran negara-negara G20 berada di kisaran 7 – 8%, di atas rata-rata dunia yang berada di angka 5 – 6%. Berdasarkan data *World Bank* pada 2019, negara-negara G20 dengan tingkat pengangguran tertinggi termasuk Afrika Selatan (28%), Turki (13%), dan Brazil (12%).

Oleh karena itu, pada berbagai KTT G20 setiap tahunnya, para pemimpin G20 senantiasa menegaskan pentingnya mencari solusi bagi tantangan-tantangan ketenagakerjaan. Berbagai tema ketenagakerjaan telah dibahas dalam TFE, EWG, dan pertemuan para menteri ketenagakerjaan, di antaranya: peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan sistem pengamanan sosial, kebijakan pasar tenaga kerja yang inklusif, kesenjangan pendapatan, kesetaraan *gender*, pengurangan pengangguran pada pemuda, dan adaptasi terhadap *future of work*.

Isu ketenagakerjaan telah menjadi sorotan di KTT G20 pada periode 2018 – 2020. Pada Presidensi Argentina tahun 2018, pembahasan isu prioritas meliputi, antara lain (i) implementasi pembinaan keterampilan kognitif, digital dan kewirausahaan; (ii) mempromosikan pekerjaan berkualitas tinggi dan pekerjaan layak di pasar kerja digital; (iii) mendorong pemberantasan pekerja anak, pekerja paksa, perdagangan manusia dan perbudakan modern di dunia kerja; dan (iv) berkomitmen memperbaiki integrasi pasar kerja dari kelompok rentan dan kurang terwakili.

Pada Presidensi Jepang tahun 2019, isu ketenagakerjaan kembali diangkat. Isu prioritas yang dibahas meliputi, antara lain (i) partisipasi usia lanjut yang aktif dalam ketenagakerjaan; (ii) memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda; (iii) mempromosikan pemanfaatan teknologi; dan (iv) mempromosikan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Indonesia sendiri telah menetapkan prioritas dalam pembahasan isu ketenagakerjaan, khususnya di bawah Presidensi Arab Saudi tahun 2020. Prioritas tersebut merefleksikan sinergi antara prioritas G20 di bawah Presidensi Arab Saudi dan kepentingan Indonesia, antara lain, meliputi:⁶

⁶ <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/prioritas-indonesia>

1. Mendorong *capacity building* bagi pemuda dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung *employability* mereka;
2. Perlu keterlibatan swasta dalam *updating* kurikulum pendidikan agar sejalan dengan kebutuhan pasar;
3. Jaminan sosial harus diarahkan pada kelompok yang paling mudah terdampak dari perubahan metode pekerjaan;
4. Perlunya melibatkan *outreach groups*, seperti W20 dan L20, dalam pembahasan isu pemberdayaan perempuan; dan
5. Mendukung bahasan tentang peningkatan akses keuangan bagi perempuan seraya meningkatkan kapasitas mereka.

3.1.2 Pembahasan Isu SDM

G20 memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas SDM di negara-negara berkembang. Isu SDM dibahas dalam DWG yang menjadi bagian dari 15 ruang lingkup pembahasan DWG.

Pembahasan isu SDM di DWG dibagi 2 (dua) fase. Fase 1 (2010 – 2015) adalah fase sebelum dibentuknya EWG dan internalisasi SDGs dalam DWG. Fase 2 (2016 – 2020) DWG mengeksplorasi fokus lain pada isu SDM sesuai dengan SDGs dan perkembangan teknologi informasi digital. Pembentukan EWG pada tahun 2015 menandai adanya pembagian bahasan isu SDM antara DWG dan EWG. *G20 Action Plan on 2030 Agenda* turut mempengaruhi pembahasan *human resource development (HRD)* di DWG yang disesuaikan dalam kerangka pencapaian SDGs.

Dengan pembagian isu bahasan DWG dan EWG, DWG tidak lagi membahas isu SDM secara substansial, namun membahas usaha dan kerja sama untuk mencapai pembangunan (*development*). EWG dapat membahas agenda implementasi untuk negara-negara, sementara DWG berfokus untuk melakukan *outreach* atau penjangkauan, dan memperkenalkan agenda-agenda tersebut dengan fokus kepada negara-negara berkembang dan LDCs.

Aspek-aspek yang dibahas dalam DWG terkait isu SDM di antaranya: *knowledge-sharing* mengenai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan di negara-negara berpendapatan rendah, implementasi *social protection floors*, kerja sama dengan organisasi internasional, pemanfaatan program Kerja Sama Selatan-Selatan dan

Triangular, serta peningkatan keterlibatan dan partisipasi perempuan dan pemuda.

Indonesia memberikan perhatian khusus pada pengembangan anak usia dini (*early childhood development/ECD*) dan investasi kapital manusia untuk pembangunan berkelanjutan di dalam DWG. Intervensi Pemerintah Indonesia pada pembahasan *G20 Initiative for Early Childhood Development* dalam DWG meliputi:

1. Konsep ECD perlu mencakup seluruh masa perkembangan anak, tidak hanya pada 1.000 hari pertama sejak kelahiran, namun juga perlu menekankan pentingnya masa perkembangan 0-6 tahun;
2. Negara-negara dapat menyusun *national action plan* sebagai panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional untuk implementasi ECD yang efektif;
3. Untuk mengawasi implementasi ECD secara efektif, negara-negara dapat membentuk sebuah gugus kerja (*task force*); dan
4. Mendorong *knowledge sharing platform* yang informatif dan interaktif yang berisi *best practices*, program, kebijakan, indikator ECD, dan sumber informasi lainnya. Agar inklusif dan mencapai banyak negara, *platform* dapat memanfaatkan media digital, seperti media sosial, *website*, dan *webinar*.

Intervensi Pemerintah Indonesia dalam pembahasan *G20 Initiative on Human Capital Investment for Sustainable Development* mencakup:

1. Prioritas pendidikan usia dini untuk kelompok yang paling tertinggal, termasuk keluarga dan anak paling miskin;
2. Memasukkan elemen pendidikan non-konvensional dan non-formal untuk memenuhi kebutuhan anak di daerah terpencil;
3. Perbaikan kualifikasi guru dan dosen serta manajemen guru melalui pelatihan *pre-service* dan *in-service*;
4. Penggunaan bahasa lokal sebagai salah satu metodologi belajar; dan
5. Mendukung penggunaan inovasi ICT sebagai metode ajar.

Pencapaian isu SDM juga tercermin dalam Deklarasi Para Pemimpin (*Leaders' Declaration*) pada KTT G20 periode 2018 – 2020. Dalam KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, tahun 2018, isu SDM ditekankan pada pentingnya identifikasi investasi negara dalam Pengembangan Anak Usia Dini/*early childhood development* (PAUD) untuk menetapkan dan mempertimbangkan

peningkatan sumber daya bagi program berkualitas melalui pendekatan holistik PAUD, terutama bagi kelompok rentan, rumah tangga miskin dan perekonomian informal. Selain itu juga perlu ditingkatkan kerja sama internasional sebagai katalisator untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas program PAUD multi-sektor, terutama dalam mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang.

Dalam KTT G20 di Osaka, Jepang, tahun 2019, disepakati pentingnya penegasan kembali komitmen untuk investasi SDM dan mempromosikan inklusivitas serta pendidikan untuk semua. Perlu juga untuk mendukung disseminasi pengetahuan dan pertukaran pembelajaran dan bekerja sama untuk mempromosikan pendidikan anak usia dini melalui platform PAUD. Tidak kalah penting yaitu promosi pendidikan berkualitas inklusif untuk semua anak perempuan dan perempuan sebagai peserta aktif, serta pembuat keputusan dalam promosi, desain, penyampaian dan evaluasi pendidikan.

KTT G20 di Riyadh, Arab Saudi, tahun 2020, menegaskan pentingnya kontinuitas pendidikan berkualitas di masa krisis serta meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan terhadap kualitas pendidikan anak usia dini. Di samping itu, diperlukan upaya untuk menghilangkan hambatan bagi partisipasi perempuan di sektor ekonomi dan kewirausahaan. Presidensi Arab Saudi juga menghasilkan *Private Sector Alliance for the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation* (EMPOWER) bagi kepentingan kemajuan kaum perempuan untuk meraih posisi strategis pada level pimpinan di perusahaan.

3.1.3 Pembahasan Isu Pendidikan

Pada 2018, Argentina yang memegang posisi Presidensi G20 melihat pentingnya pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan global di masa depan. Dalam memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif, kebijakan pendidikan yang baik, dan mekanisme pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.

Di tahun yang sama, dibentuk EdWG untuk membahas isu-isu terkait pendidikan. Tema-tema utama dalam EdWG meliputi: (i) *skills for life and work* (mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan masyarakat ke dalam pasar tenaga kerja); (ii) *financing education and international cooperation* (mengidentifikasi mekanisme internasional dalam

membiayai pendidikan); (iii) *early childhood education* (mengembangkan dan meratakan akses bagi pendidikan usia dini sebagai pondasi pengembangan kompetensi); dan (iv) *internationalization in education* (menginisiasi kerja sama internasional di bidang pendidikan).

Presidensi Argentina pada 2018 tersebut menetapkan opsi-opsi kebijakan dalam rangka mendukung implementasi dan memperkuat kebijakan pendidikan. Opsi-opsi kebijakan tersebut terbagi ke dalam beberapa fokus, di antaranya: (i) pengembangan kurikulum yang berkualitas; peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi guru; (ii) penerapan strategi-strategi pembelajaran baru, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi; (iii) dukungan bagi siswa dalam masa transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (iv) dorongan bagi anak perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan; (v) pengembangan sistem pendidikan inklusif untuk mengikutsertakan kelompok rentan; (vi) peningkatan investasi untuk pembiayaan pendidikan; serta (vii) peningkatan kerja sama internasional di bidang pendidikan.

Presidensi Jepang pada 2019 secara khusus menitikberatkan pada prioritas isu pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Negara-negara G20 berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, penguatan akses terhadap kurikulum STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*), serta peningkatan *awareness* bagi penghapusan stereotip *gender*.

Terkait dengan pembahasan isu pendidikan di G20 di bawah Presidensi Arab Saudi, Indonesia memiliki sejumlah prioritas yang sinergis dengan kepentingan Indonesia, yaitu:⁷

1. Prioritas utama pemerintah Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah pengembangan kualitas SDM, antara lain melalui reformasi sektor pendidikan;
2. Salah satu tantangan utama dalam memajukan pendidikan adalah isu kesenjangan/ketimpangan akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan;

⁷ *Ibid.*

3. Mengatasi tantangan tersebut, teknologi perlu dioptimalkan sebagai salah satu sistem manajemen pembelajaran. Teknologi, secara prinsip, tidak boleh dan tidak akan menggantikan peran guru;
4. Teknologi juga perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan anak, terutama guna mengasah kreatifitas; dan
5. Perlunya pengawasan orang tua dalam konteks pemanfaatan teknologi oleh anak-anak agar tidak menimbulkan dampak negatif, terutama yang menyangkut kesehatan dan *social behaviour* mereka.

Secara khusus, Indonesia telah memberikan intervensi dalam merespon pembahasan aspek *survey childhood education*:⁸

1. Survei untuk kajian penggunaan teknologi untuk PAUD tidak hanya diperuntukkan kepada Menteri Pendidikan, saja tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain seperti praktisi pendidikan, murid, dan orang tua untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam atas aspek yang perlu dikembangkan dari kebijakan penggunaan teknologi digital dalam dunia pendidikan, khususnya di PAUD dan pendidikan dasar selama masa pandemi; dan
2. Proposal riset yang dilakukan oleh OECD perlu mencakup kajian peran teknologi pada sistem pendidikan di negara kepulauan termasuk *on-boarding technologies*.

Sebagai respon terhadap aspek *education continuity*, Indonesia memberikan masukan untuk perlunya memberikan perhatian khusus bagi anak berkebutuhan khusus terutama pada masa pandemi.

⁸ Paparan Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada FGD "Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia Indonesia", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020.

Tabel 6
Perbandingan Outcome G20 Periode 2018 – 2020
Isu Pendidikan dan Ketenagakerjaan

	PRESIDENSI ARGENTINA PADA G20 2018	PRESIDENSI JEPANG PADA G20 2019	PRESIDENSI ARAB SAUDI PADA G20 2020
ISU PRIORITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan masyarakat (<i>empowering people</i>) dengan menciptakan kondisi dimana semua orang, khususnya perempuan dan generasi muda, dapat hidup, bekerja dan berkembang. 2. Menjaga planet bumi (<i>safeguarding the planet</i>) dengan mendorong upaya bersama untuk melindungi kepentingan global. 3. Membentuk batasan baru (<i>shaping new frontier</i>) dengan mengadopsi strategi jangka panjang yang jelas untuk berbagi manfaat dari inovasi dan kemajuan teknologi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh faktor struktural terhadap ekonomi global 2. Perdagangan dan investasi 3. Inovasi 4. Lingkungan dan energi 5. Ketenagakerjaan 6. Pemberdayaan perempuan 7. Pembangunan (kualitas infrastruktur dan investasi sumber daya manusia) 8. Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa depan pekerjaan: mengeluarkan potensi masyarakat. 2. Infrastruktur untuk pembangunan: memobilisasi sumber daya sektor swasta untuk mengurangi defisit infrastruktur. 3. Masa depan pangan berkelanjutan: memperbaiki tanah/lahan dan meningkatkan produktivitas.
SEKTOR PENDIDIKAN (SHERPA TRACK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Education and Skills Policies</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya kurikulum sekolah yang responsif terhadap praktik 	Menitikberatkan pada prioritas isu pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Negara-negara G20 berkomitmen untuk	Pokok-pokok hasil <i>G20 Education Ministers' Communique</i> pada 5 September 2020: a. <i>Preamble</i>

	<p>berbasis bukti, tren pekerjaan masa depan, dan dirancang secara kolaboratif dengan para pemangku kepentingan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya membekali guru dengan keterampilan digital TIK, pengetahuan dan nilai serta sikap yang bebas dari bias <i>gender</i>; dan • Pentingnya memperkuat hubungan antara pendidikan dan kehidupan siswa dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan komunitasnya serta fase transisi di setiap tingkatan sekolah mulai SD sampai universitas. <p>2. <i>Financing Education</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya tata kelola, manajemen, <i>monitoring</i> dan tanggung jawab dalam alokasi investasi pendidikan secara 	<p>menyediakan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, penguatan akses terhadap kurikulum STEM (<i>Science, Technology, Engineering and Mathematics</i>), serta peningkatan <i>awareness</i> bagi penghapusan stereotip <i>gender</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung upaya individu dan kolektif untuk mitigasi dampak pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pendidikan dan memastikan pentingnya kelangsungan pendidikan dan keamanan untuk semua di saat krisis; • Menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan dasar untuk perwujudan hak-hak lain serta landasan untuk pengembangan pribadi yang menyediakan anak-anak, remaja dan orang dewasa dengan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang diperlukan untuk
--	--	--	---

	<p>efektif dan efisien; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya memprioritaskan dana pendidikan domestik dan internasional untuk perbaikan kualitas hasil pembelajaran, kesetaraan, inklusif dan mendukung kelompok rentan dan kurang beruntung serta alokasi investasi untuk pendidikan dini. <p>3. <i>International Cooperation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong untuk berbagi kebijakan dan program untuk pengembangan keterampilan melalui kebijakan <i>Digital Repository</i>; • Memfasilitasi internasionalisasi pendidikan termasuk pengakuan kualifikasi dan keterampilan lintas batas, mobilitas siswa, guru, akademisi dan non-akademisi, pelatih dan peneliti; dan 		<p>mencapai potensi penuh mereka;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menegaskan kembali komitmen untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua; • Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memajukan akses pendidikan untuk semua, khususnya anak perempuan, dan memberdayakan perempuan, remaja dan kelompok rentan; dan • Pentingnya meningkatkan akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas sebagai landasan untuk pengembangan generasi saat ini
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan program pertukaran dan beasiswa diantara anggota G20 dan negara lain, khususnya negara berkembang. 		<p>dan masa depan dan sebagai bagian mendasar dari mempromosikan kesetaraan dan inklusivitas dalam pendidikan.</p> <p>b. <i>Education Continuity in Times of Crisis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pengembangan kebijakan dan langkah-langkah untuk memprioritaskan keberlangsungan belajar mengajar selama dan setelah pandemi dan kesehatan dan keselamatan komunitas Pendidikan, pelajar, guru, pendidik, staf dan orang tua sesuai konteks lokal, nasional dan regional; dan • Menekankan pentingnya penelitian dan data untuk menilai hasil belajar dan kualitas
--	--	--	---

pembelajaran jarak jauh.

c. *Early Childhood Education (ECE)*

- Menekankan pentingnya perbaikan aksesibilitas dan keterjangkauan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini untuk semua anak, khususnya bagi kelompok rentan;
- Mendorong kerja sama dan kolaborasi seluruh tingkat pendidikan sesuai dengan konteks negara, sehingga manfaat kualitas Pendidikan Anak Usia Dini terwujud dan berlanjut; dan
- Perlunya mengurangi kesenjangan digital dengan menyediakan komunitas pendidikan termasuk kelompok rentan,

dengan dukungan dan pendidikan yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan perangkat teknologi.

d. *Internationalization in Education*

- Menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan kemitraan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam konteks krisis global seperti pandemi COVID-19;
- Perlunya lingkungan belajar yang memungkinkan siswa, guru dan pendidik untuk berkolaborasi dan terlibat dalam dunia yang saling terhubung;
- Mendorong integrasi dimensi internasional dan antar-budaya

			<p>(<i>intercultural</i>) ke dalam semua tingkatan umum (K-12), pendidikan tinggi, kejuruan dan pelatihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berupaya mendukung akses bagi masyarakat yang paling rentan dan mengurangi kesenjangan digital; dan • Mendukung diskusi tentang internasionalisasi tingkat K-12.
<p>SEKTOR KETENAGAKERJAAN (SHERPA TRACK)</p>	<p>Isu prioritas yang dibahas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Unleashing people's potential through an innovative and coordinated skills development policy</i> <ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen untuk mendorong kerja sama internasional untuk memperbaiki sistem informasi pasar agar menghasilkan data yang bisa dibandingkan 	<p>Pokok-pokok hasil <i>G20 Labour and Employment Ministers' Declaration</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Demografi <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya mempromosikan masyarakat usia lanjut yang aktif yang memungkinkan semua untuk berpartisipasi dalam pasar kerja tanpa diskriminasi; • Mendukung kebijakan prioritas G20 	<p>Pokok-pokok hasil <i>G20 Labour and Employment Ministerial Declaration</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya melindungi dan mempromosikan pekerjaan yang layak untuk semua, khususnya bagi perempuan dan generasi muda dalam pasar tenaga kerja domestik dan global;

	<p>secara internasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dialog multi-pihak dengan pengusaha, pekerja, pemerintah, dan lembaga pendidikan-pelatihan untuk mempromosikan pertukaran informasi dan memperbaiki rancangan kebijakan dan implementasinya; dan • Melanjutkan implementasi <i>G20 Entrepreneurship Action Plan</i> (Beijing, 2016) dengan pembinaan keterampilan kognitif, digital dan kewirausahaan. <p>2. <i>Building a fair Future of Work by promoting formalization and improving labour conditions</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan pekerjaan yang layak, inklusif dan setara dan perlindungan atas 	<p>tentang usia lanjut yang aktif dalam ketenagakerjaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya mempromosikan kebijakan yang mendukung para pekerja untuk menunda pensiun dan pensiun yang lebih fleksibel dengan tetap mempertahankan manfaat pensiun yang cukup dan berkelanjutan; • Melanjutkan upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda, kemampuan kerja termasuk melalui pendidikan dan pelatihan; • Mendukung karir yang lebih panjang sejalan dengan kebijakan prioritas G20 tentang usia lanjut yang aktif dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian lain untuk membantu memastikan pemulihan ekonomi pasca pandemi memiliki fokus pada pekerjaan, serta untuk membangun dan mengimplementasikan tindakan yang efektif guna mitigasi dampak COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja dan masyarakat; • Memberikan kondisi kerangka kerja yang baik dan dukungan bagi pengusaha termasuk UMKM untuk mempertahankan usahanya, menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan tangguh serta mempertahankan pekerja; dan
--	---	--	--

	<p>prinsip fundamental dan hak-hak dalam bekerja;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen untuk mempromosikan pekerjaan berkualitas tinggi dan pekerjaan layak di pasar kerja digital; • Berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kebijakan untuk mempromosikan formalisasi pekerja dan pekerjaan yang layak di masa depan; dan • Mendorong G20 untuk memberantas pekerja anak, pekerja paksa, perdagangan manusia dan perbudakan modern di dunia kerja. <p>3. <i>Making social protection more sustainable, adaptable and responsive to the new social and labour market dynamics</i></p>	<p>ketenagakerjaan untuk pekerjaan dan kemampuan adaptasi pekerja yang lebih baik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berupaya dengan mitra sosial untuk perubahan pola pikir dan perilaku di pihak pemerintah, mitra sosial dan individu tentang kehidupan kerja yang lebih lama dan lebih dinamis; • Menyetujui bahwa meningkatkan kualitas pekerjaan perawatan membutuhkan formalisasi, perbaikan dalam kondisi kerja termasuk upah, jam kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan perlindungan sosial, perlindungan dari kekerasan dan pelecehan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terus beradaptasi dan memperbaiki sistem perlindungan sosial untuk memberikan akses perlindungan sosial yang memadai dan terus mempromosikan akses terhadap pekerjaan. <p>2. <i>Adapting Social Protection to Reflect the Changing Patterns of Work</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan upaya secara individu dan kolaboratif untuk mencapai sistem perlindungan sosial yang kuat melalui peningkatan koordinasi dan upaya internasional; • Memastikan bahwa hak-hak pekerja dihormati dan membangun sistem perlindungan sosial yang kuat
--	--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kerangka kebijakan yang menguatkan kebijakan perlindungan sosial secara finansial berkelanjutan dan memberi ruang untuk inovasi; • Berkomitmen untuk mempromosikan secara aktif akses untuk perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja dan mendorong perlakuan non-diskriminatif dan adil tanpa memandang status pekerjaan seseorang; dan • Mempromosikan portabilitas jaminan sosial antar status pekerjaan dan antar negara, tergantung pada keadaan dan hukum nasional. <p>4. <i>Leaving no one behind: shaping an equitable and inclusive future of work</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan pemanfaatan teknologi dalam pengaturan jangka panjang sesuai dengan keadaan nasional. <p>2. <i>Kesetaraan Gender</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berupaya untuk kerja sama dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan untuk mengatasi stereotip gender yang dapat membatasi kesempatan bagi perempuan untuk bekerja; • Berupaya mengurangi jam kerja yang panjang, mempromosikan fleksibilitas kerja untuk laki-laki dan perempuan tanpa memengaruhi pengembangan karir dan mendorong kualitas yang 	<p>serta memberikan akses yang memadai untuk semua; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendukung opsi kebijakan dalam mengadopsi perlindungan sosial untuk merefleksikan perubahan pola kerja untuk membantu mempromosikan klasifikasi pekerja yang tepat. <p>3. <i>Better Preparing Youth for the Transitions to Work</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen mempromosikan peta jalan 2025 generasi muda G20 sesuai dengan keadaan nasional untuk meningkatkan prospek pasar tenaga kerja para kaum muda; dan • Mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan generasi muda melalui
--	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Berkomitmen memperbaiki integrasi pasar kerja dari kelompok rentan dan kurang terwakili; • Mendorong pengumpulan, harmonisasi dan analisis data rinci gender termasuk di sektor bisnis; • Melanjutkan upaya pemberantasan diskriminasi, pengucilan pekerjaan dan kekerasan berbasis <i>gender</i>; • Berkomitmen untuk mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas di pasar kerja; dan • Meningkatkan upaya memperbaiki pengumpulan data penyandang disabilitas terkait ketenagakerjaan dan perbandingan dukungan internasional. 	<p>baik untuk pekerjaan paruh waktu;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berinvestasi sesuai dengan kondisi nasional dalam penitipan anak dan perawatan jangka panjang untuk meningkatkan penyediaan perawatan berkualitas; dan • Mempromosikan kesetaraan <i>gender</i> di pasar tenaga kerja dengan mendorong pemberi kerja meningkatkan transparansi dalam hal kinerja kesetaraan <i>gender</i>. <p>3. <i>New Forms of Work</i></p> <p>Arah kebijakan dalam merespons bentuk baru pekerjaan adalah dengan pengklasifikasian pekerja secara benar, memperluas hak pekerja dan</p>	<p>fasilitasi agar berhasil memasuki pasar tenaga kerja dan masa transisi, memperkuat dukungan bagi generasi muda dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh remaja putri dalam mendapatkan akses terhadap pekerjaan berkualitas.</p> <p>4. <i>Achieving Gender Equality in the World of Work</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menegaskan komitmen untuk memenuhi tujuan yang disepakati di Brisbane pada tahun 2014, yaitu untuk mengurangi kesenjangan <i>gender</i> dalam tingkat partisipasi kerja antara perempuan dan laki-laki sebesar 25% pada tahun 2025; dan
--	---	--	---

		<p>mempromosikan perlindungan sosial dan kesempatan belajar seumur hidup.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong akses ke layanan perawatan berkualitas dan terjangkau, pembagian yang lebih seimbang atas tanggung jawab rumah tangga dan perawatan antara perempuan dan laki-laki, dan mengurangi kesenjangan dalam kualitas pekerjaan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan serta kesenjangan gaji dan pensiun. <p>5. <i>Exploring Behavioral Insights Application for Robust Labor Market Policies</i></p> <p>Perlunya tindakan inovatif dan tepat waktu untuk membantu para pembuat kebijakan menghadapi berbagai tantangan, dan juga tantangan jangka panjang oleh generasi muda,</p>
--	--	---	---

			perempuan serta kelompok rentan dan tersisih, termasuk dalam pemulihan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.
--	--	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, antara lain *G20 Leaders' Declaration* dan *G20 Ministerial Declaration*

3.2 Kondisi dan Tantangan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia di Indonesia

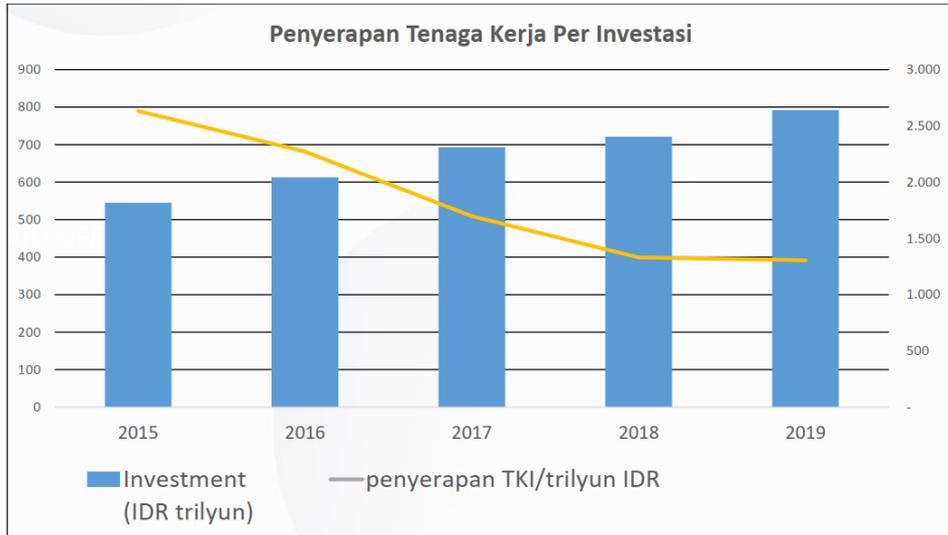
3.2.1 Tantangan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas SDM

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan data UNDP 2019, Indonesia berada urutan 111 dari 189 negara. Jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 yang lain, Indonesia mempunyai IPM terendah kedua setelah India. Dengan demikian, salah satu tantangan terbesar dalam negeri Indonesia adalah peningkatan IPM melalui pemberdayaan SDM. Isu peningkatan daya saing dan produktivitas SDM memang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Indonesia diuntungkan dengan adanya bonus demografi.

Namun, Indonesia tetap tidak boleh lengah karena ada kemungkinan terjadinya *middle income trap*. Indonesia perlu menangani bonus demografi dengan baik, karena jika tidak fenomena bonus demografi justru dapat pula menjadi *liability*. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 kiranya dapat dilaksanakan dengan dampak seminimal mungkin terhadap pembangunan dan pengangguran.

Indonesia mencatat pencapaian yang baik sejak 5 tahun ke belakang di bidang industri. Realisasi investasi konsisten meningkat selama 5 tahun. Akan tetapi, timbul tantangan baru yaitu perkembangan *Industry 4.0*. Lebih lanjut, meskipun investasi meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerja justru menurun karena peningkatan investasi lebih banyak di sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, yaitu industri yang padat modal. Industri berbasis teknologi atau *Industry 4.0* melibatkan digitalisasi dan automasi sehingga tenaga kerja manusia tidak banyak dibutuhkan lagi.

Gambar 1
Penyerapan Tenaga Kerja per Investasi⁹



Karena itu, dibutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi. Peningkatan penyerapan *high-skilled workers* sangat tinggi (24%) dibandingkan *low-skilled workers* (8%) dan *semi-skilled workers* (-6%). Selain itu, penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan setara universitas dan SMK juga meningkat drastis.

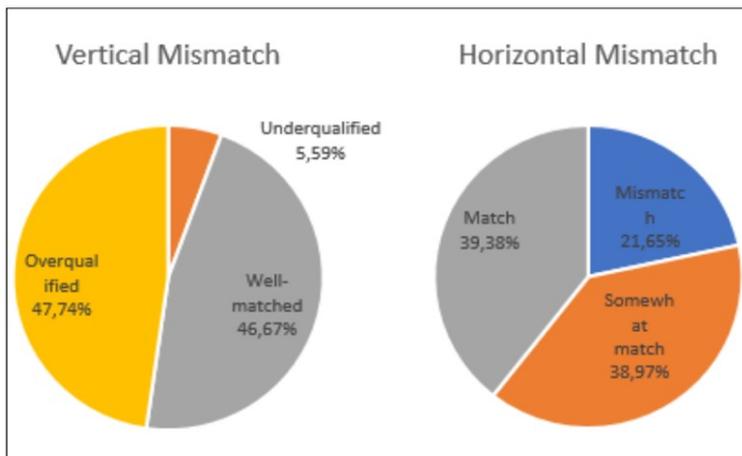
Akan tetapi, terdapat pula ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja hingga 53,33% akibat ketidaksesuaian tingkat pendidikan (*overqualified* atau *underqualified*), yang disebut dengan *vertical mismatch*. Terdapat pula ketidaksesuaian dalam hal bidang studi yang dibutuhkan industri dengan keterampilan pekerja (*horizontal mismatch*).

⁹ Sumber BKPM, dikutip dari Paparan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia Indonesia”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020.

Gambar 2
Penyerapan Tenaga Kerja Berkompensi¹⁰



Gambar 3
Ketidaksesuaian Antara Pendidikan dan Kebutuhan Tenaga Kerja¹¹



¹⁰ Sumber: BPS, dikutip dari Paparan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia Indonesia”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020.

¹¹ *Ibid.*

Beberapa faktor penyebab *mismatch* antara pendidikan dan kebutuhan industri di antaranya adalah: (i) informasi dan intermediasi pasar tenaga kerja yang kurang memadai; (ii) ketidakcocokan dan kurangnya standarisasi kualitas pendidikan dan TVET (*technical and vocational education and training*) terhadap kebutuhan industri; terbatasnya peluang untuk *internship* dan *on-the-job training*; serta (iii) perubahan struktural dan kebutuhan industri yang cepat dan tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang responsif. Karenanya, penting halnya untuk membangun kurikulum dan kebijakan yang sesuai dengan pembangunan industri.

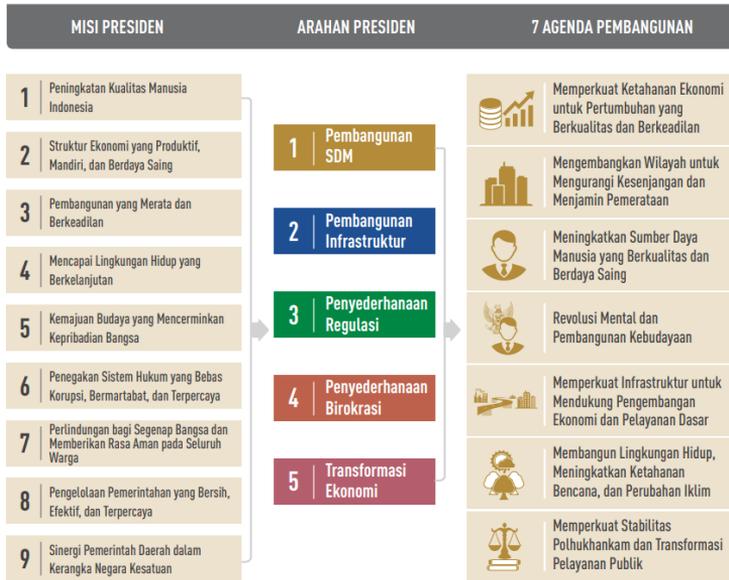
Terdapat inisiatif swasta untuk merancang strategi pengembangan SDM yang terpadu. Strategi ini diawali dengan bagaimana Indonesia dapat membangun landasan pengembangan industri dan SDM lokal yang kuat melalui standarisasi serta pengembangan infrastruktur dan kurikulum. Langkah kedua adalah memperkuat ekosistem pengembangan industri dan SDM lokal melalui, di antaranya, pendirian komite vokasi di daerah dan perencanaan tenaga kerja. Pada akhirnya rancangan strategi ini diharapkan dapat mengembangkan SDM berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan industri.

Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi *stakeholders* nasional seperti Kementerian/Lembaga, swasta/industri, serta pemerintah daerah. *Stakeholders* nasional berperan dalam mengembangkan kerangka, kurikulum, dan standarisasi, sedangkan *stakeholders* daerah berperan dalam mengawasi pelaksanaan dan memberikan rekomendasi.

3.2.2 Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas SDM

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peningkatan SDM merupakan salah satu dari 7 Agenda Pembangunan seperti tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024. Lebih dari itu, peningkatan SDM juga termasuk dalam Visi – Misi dan Arahannya utama Presiden. Visi – Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Sedangkan, Arahannya Presiden disusun sebagai strategi dalam pelaksanaan Visi – Misi Presiden 2020 – 2024. Visi-Misi dan Arahannya tersebut kemudian dijadikan landasan utama dalam penyusunan 7 Agenda Pembangunan.

Gambar 4
Misi dan Arahan Presiden serta 7 Agenda Pembangunan



Agenda Pembangunan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing” menetapkan beberapa sasaran pembangunan dalam rangka mengatasi berbagai isu terkait peningkatan kualitas SDM. Sasaran-sasaran tersebut adalah: (i) terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; (ii) meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; (iii) terpenuhinya layanan kesehatan dasar; (iv) meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (v) terwujudnya pengentasan kemiskinan; serta (vi) meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut, RPJMN 2020 – 2024 juga menetapkan arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas SDM, yaitu:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui: (i) percepatan cakupan administrasi kependudukan; (ii) integrasi sistem administrasi kependudukan; serta (iii) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, melalui: (i) penguatan pelaksanaan jaminan sosial; (ii) penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran; (iii)

perlindungan sosial adaptif; (iv) peningkatan kesejahteraan sosial; serta (v) penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu;

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui: (i) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi; (ii) percepatan perbaikan gizi masyarakat; (iii) peningkatan pengendalian penyakit; (iv) pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; serta (v) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui: (i) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (ii) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (iii) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; (iv) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah; serta (v) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: (i) perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya; (ii) peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iii) peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO; serta (iv) peningkatan kualitas pemuda;
6. Mengentaskan kemiskinan, melalui: (i) akselerasi penguatan ekonomi keluarga; (ii) keperantaraan usaha dan dampak sosial; (iii) reformasi agraria; serta (iv) pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial; dan
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing, melalui: (i) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; (ii) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; (iii) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; (iv) pengembangan budaya dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional; (v) penguatan pendamping pembangunan; serta (vi) pengelolaan manajemen talenta nasional.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2022. Presidensi Indonesia diharapkan dapat menciptakan persamaan persepsi antara negara maju dan negara berkembang dalam menghadapi dan mengatasi tantangan global.

Masa Presidensi Indonesia merupakan momentum yang baik untuk membangun kembali ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Strategi diplomasi Indonesia perlu diarahkan agar forum G20 dapat memberikan *strategic guidance/direction* untuk pemulihan ekonomi global, keberlanjutan pembahasan isu-isu tradisional G20, dan memajukan prioritas kepentingan nasional Indonesia yang strategis.

Tema Presidensi Indonesia “**Recover Together, Recover Stronger**” mencakup 3 (tiga) pilar utama, yaitu: (a) *promoting productivity*; (b) *increasing resilience and stability*; dan (c) *ensuring sustainable and inclusive growth*. Berdasarkan tema utama dan ketiga pilar ini, maka perlu ditetapkan *flagship* dan *concrete deliverables* untuk Presidensi Indonesia di G20.

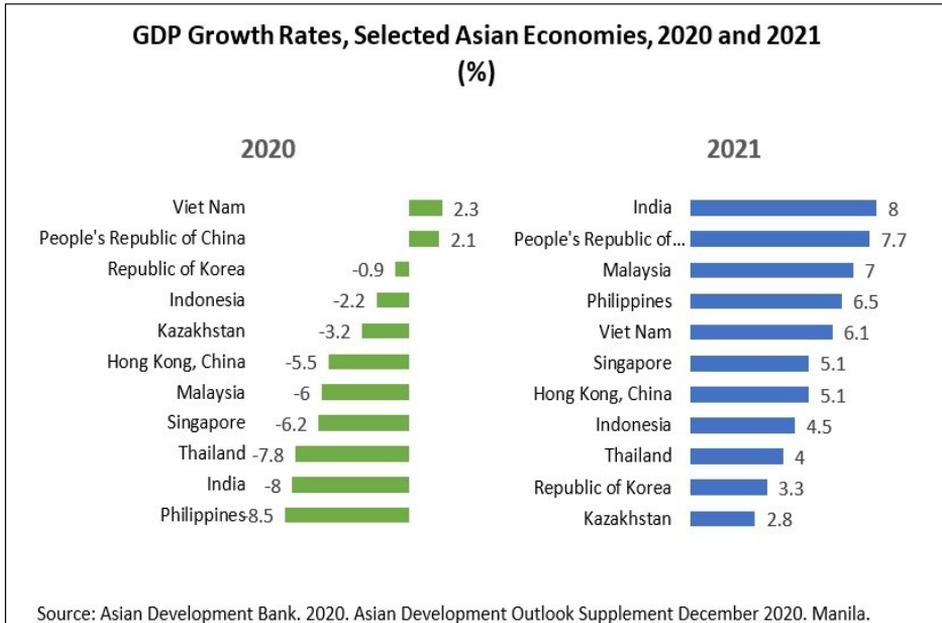
Sehubungan dengan hal ini, kajian ini melihat secara lebih mendalam untuk potensi agenda prioritas kerja Presidensi Indonesia di G20 yang mencakup 2 (dua) bidang, yaitu: (a) ekonomi digital, dan (b) peningkatan daya saing dan produktivitas SDM.

4.1.1 Ekonomi Digital

Ekonomi digital telah menjadi bagian penting dari keseluruhan ekonomi nasional dan global. Ekonomi digital semakin penting perannya pada masa COVID-19. Sebagai ilustrasi, berdasarkan data BPS yang dikutip Kementerian Komunikasi dan Informatika, sektor informasi dan komunikasi (infokom) mencatat pertumbuhan tertinggi pada Kuartal II 2020. Pertumbuhan sektor infokom 10,88% pada Kuartal II 2020 disinyalir menguat karena selama pandemi COVID-19 masyarakat menggantungkan kehidupannya pada

ekonomi digital. Bahkan bisnis daring *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) diprediksi akan meningkat 400% selama tahun 2020¹².

Gambar 5
GDP Growth Rates



Pandemi COVID-19 telah memicu respon, baik secara ekonomi maupun social, di populasi global yang saat ini terkoneksi secara digital. *Asian Development Bank* memproyeksikan ekonomi negara-negara di kawasan Asia akan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2021, yang sebagian diantaranya disumbangkan oleh sektor ekonomi digital. Kajian yang dilakukan UNCTAD dan *eTrade* memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas *e-commerce* di tengah pandemi. Bahkan para konsumen di ekonomi berkembang memperlihatkan perpindahan cara belanja ke pembelanjaan daring. UNCTAD mencontohkan pasar daring Amerika Selatan, *Mercado Libre* mencetak penjualan dua kali lipat *year-on-year* (y-o-y) di triwulan kedua 2020, sementara *platform e-commerce* dari Afrika, Jumia, mencetak peningkatan

¹² <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/ekonomi-digital-jadi-penopang-perekonomian-di-tengah-pandemi/>, diakses tanggal 8 September 2020

transaksi y-o-y sebesar 50% di semester pertama 2020. Pada bulan April 2020, peningkatan transaksi *online* global y-o-y tercatat sebesar 42,8% dengan peningkatan sebesar 135% untuk supermarket dan 72,9% untuk sektor pariwisata.¹³

Presidensi Indonesia di G20 pada bidang ekonomi digital kiranya dapat ditujukan untuk memajukan kepentingan nasional dengan pembentukan norma dengan memajukan norma “desentralistik”. Norma desentralistik didasari pengakuan bahwa perlindungan HAKI dan distribusi keahlian teknis dan pengetahuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi digital.

Pendekatan norma desentralistik tersebut diperkirakan dapat memperoleh dukungan dari negara-negara sejawat dalam isu-isu sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7
Peluang Aliansi Indonesia dengan Negara-Negara G20

No	Isu	Peluang Aliansi
1.	Lokalisasi Data	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan kepentingan: Uni Eropa, China, Rusia, dan India • Berdasarkan identitas: Meksiko, Korea Selatan, Turki, Australia
2.	HAKI	Brazil, Argentina, India, Afrika Selatan
3.	Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Digital: Brazil, Kanada, Perancis, India, Italia, Meksiko, Rusia, Turki, Inggris, Uni Eropa • Bea Masuk: India dan Afrika Selatan

Dalam hal ini, Indonesia dapat memajukan melalui *Digital Economy Task Force* beberapa elemen utama, yaitu: (1) *cross-border data flows* (lokalisasi data); (2) inovasi dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan (3) pajak digital dan bea masuk barang digital.

¹³ https://www.g20-insights.org/policy_briefs/digital-trade-in-a-post-pandemic-data-driven-economy/ diakses tanggal 13 Oktober 2020

4.1.2 Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas SDM

Peningkatan daya saing dan produktivitas SDM merupakan kepentingan nasional Indonesia dan akan semakin penting dalam konteks pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Negara-negara *emerging economies* G20 diperkirakan dapat mendukung inisiatif di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi yang dapat turut menyesuaikan kualifikasi SDM sesuai kebutuhan pasar sehingga dapat mengatasi pengangguran. Negara-negara maju G20 umumnya memiliki pendidikan dan pelatihan vokasi dengan cukup baik dan memiliki kepentingan terhadap pendidikan vokasi 4.0 dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja angkatan muda.

Dalam hal ini, Indonesia dapat majukan isu strategis peningkatan daya saing dan produktivitas SDM sebagai salah satu agenda prioritas Indonesia sesuai kepentingan nasional. Isu strategis tersebut dapat diangkat pada berbagai kelompok kerja G20 di bidang ketenagakerjaan, pembangunan (untuk isu SDM), dan pendidikan.

4.2 Peran Kementerian Luar Negeri

Sebagai wakil Pemerintah RI yang menjadi garda terdepan implementasi kebijakan luar negeri, Kementerian Luar Negeri turut mengedepankan berbagai isu strategis dalam diplomasi Indonesia untuk mendorong penyusunan agenda prioritas G20 berdasarkan kepentingan nasional Indonesia dan tren pembahasan di forum G20. Kajian menyampaikan rekomendasi untuk pelembagaan norma (*norm-setting*) ekonomi digital melalui norma desentralistik, dan peningkatan daya saing dan produktivitas SDM.

Dalam berbagai pertemuan koordinasi antar kementerian dan lembaga, Kementerian Luar Negeri secara spesifik memiliki tugas: (1) penyusunan kalender nasional; (2) koordinasi dengan Troika, anggota G20, dan organisasi internasional; (3) *capacity building* tim substansi; 4) pembuatan logo dan website G20 Indonesia; (5) penyusunan panduan bagi *Working Group* dan *engagement group*; (6) penyusunan *media package*; dan (7) pembuatan acara *Voyage to Indonesia 2022*.

4.3 Rekomendasi Kebijakan

4.3.1 Ekonomi Digital

Kajian ini telah menampilkan telaah pustaka, konstelasi perkembangan 3 (tiga) isu utama, yaitu lokalisasi data, HAKI, dan perpajakan digital. Kajian ini juga memberikan analisis awal dalam *norm-setting* untuk ketiga isu tersebut. Dari hasil analisis, dinamika normatif di forum G20 menunjukkan kompetisi norma hegemonik, kooperatif dan desentralistik.

Dari sisi kepentingan Indonesia, pola pembentukan norma yang bersifat desentralistik sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Meskipun norma-norma yang sangat melindungi kepentingan negara-negara maju selama pembahasan di forum G20 cenderung terlihat mendominasi, norma-norma yang kooperatif dan memberikan ruang kepada kepentingan negara berkembang tetap diketengahkan oleh negara-negara Presidensi G20. Prinsip ini dapat menjadi fondasi *norm-setting* yang penting bagi strategi diplomasi Indonesia ke depan.

Konstelasi perkembangan isu dan norma di ranah ekonomi digital dalam forum G20 dan materialisasinya dalam posisi negara-negara anggota terutama negara yang berperan sebagai Presidensi G20 menunjukkan posisi negara-negara Presidensi G20 sejak 2015 – 2020 yang mendorong prinsip *fairness, openness, inovasi, dan sustainability* dengan nuansa yang bervariasi. Hal ini terlihat dalam sikap negara Presidensi G20 untuk mendorong secara konsisten dan berkesinambungan rumusan norma yang berusaha mengakomodir kepentingan seluruh anggota. Hal ini merupakan platform yang bisa terus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong kepentingan nasional.

Nuansa kepentingan domestik negara-negara Presiden G20 terlihat sangat kental mewarnai debat normatif terkait ekonomi digital. Sejak isu ekonomi digital diangkat dalam agenda forum G20 pada tahun 2015, negara-negara berkembang awalnya memajukan agenda *bridging digital divide*, namun secara perlahan tidak lagi menjadi agenda prioritas dari negara-negara berkembang. Hal ini terutama terjadi 2 (dua) tahun terakhir sejak Presidensi Jepang pada tahun 2019 dimana norma *bridging digital divide* beralih fokus menjadi pencapaian SDGs melalui digitalisasi. Periode Presidensi Saudi Arabia tidak secara spesifik merespon terhadap pergeseran agenda normatif dari *digital divide* menjadi pencapaian SDSs melalui digitalisasi.

Periode Presidensi Arab Saudi menampilkan deviasi normatif dari pembahasan ekonomi digital yang sebelumnya telah dilakukan ketika isu-isu yang dibawa sangat terkonsentrasi pada tantangan perpajakan digital, pemanfaatan investasi finansial *Big Tech*, serta penanganan risiko dan penjaminan ketahanan siber yang merupakan kepentingan domestik Arab Saudi.

Dengan demikian, berdasarkan preseden dari Arab Saudi, agenda yang diusulkan tentang ekonomi digital untuk Presidensi Indonesia di tahun 2022 dapat berbeda dengan apa yang telah dibahas sebelumnya di G20 dan menekankan prioritas domestik Indonesia sebagai negara berkembang dan pasar konsumen ekonomi digital. Diharapkan agenda yang diangkat Indonesia dapat merevitalisasi partisipasi negara berkembang dalam pembahasan isu digital ekonomi.

Untuk menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, Indonesia dapat mengaitkan agenda-agenda ekonomi digital dengan SDGs yang sebelumnya telah diangkat oleh Jerman dan Jepang terkait isu-isu non-tradisional dalam kerangka *sustainability* (misalnya energi, teknologi digital, kesehatan dan *gender*) dan *responsibility* (misalnya *displacement* dan *migration*, pembangunan di Afrika, terorisme, korupsi dan keamanan pangan).

Hal tersebut dapat menjadi titik tolak untuk menjajaki dialog dengan negara maju yang kemungkinan dapat mendukung agenda ekonomi digital yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang. Terkait dengan pendekatan Presidensi sebelumnya, Indonesia kiranya dapat menjajaki kerja sama dengan Jerman dan Jepang untuk mengawal komitmen terhadap isu-isu non-tradisional yang sejalan dengan kepentingan negara-negara berkembang.

Dengan demikian, agenda Presidensi Indonesia di G20 kiranya dapat merefleksikan kepentingan Indonesia yang ingin memajukan isu *bridging digital divide*. Regulasi ekonomi digital dan *e-commerce* di Indonesia perlu diarahkan dari *consumption-based* menjadi *innovation-based*. Pelaku *e-commerce* dalam negeri menyampaikan bahwa penjual dari luar negeri memandang Indonesia sebagai pasar yang mempunyai potensi yang besar dan mendominasi kegiatan *e-commerce* di Indonesia.

UMKM Indonesia memerlukan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah karena jumlah UMKM Indonesia terbatas dan kapasitasnya masih kurang kompetitif dibanding jumlah penjual UMKM dan kapasitas mereka yang berasal dari luar negeri. India dapat menjadi studi kasus dan *benchmark* untuk menyeimbangkan peranan pelaku UMKM dalam negeri dan penjual luar negeri dalam pasar *e-commerce* di Indonesia.

Namun demikian, produk ekonomi kreatif Indonesia berhasil melakukan penetrasi pasar dunia. Pengembangan ekonomi kreatif Indonesia perlu mendapat fasilitasi dan dukungan dari pemerintah dan sektor swasta agar para pelaku ekonomi kreatif terutama UMKM di Indonesia dapat memanfaatkan *e-commerce*.

Pembahasan ekonomi digital terus berjalan di berbagai forum internasional. Dalam *Joint Statement Initiative (JSI) on E-Commerce* di WTO, negara-negara partisipan yang difasilitasi Australia, Jepang dan Singapura sedang membahas *consolidated negotiating text* dengan penekanan pada isu prinsip keterbukaan, transparansi dan inklusivitas, isu-isu *cross-cutting*, telekomunikasi; akses pasar, perlindungan konsumen, data pemerintah terbuka, dan *paperless trading*.

Sementara itu, OECD sedang membahas skema perpajakan digital dimana OECD mengemukakan dua pilar perpajakan digital yaitu: (1) hak perpajakan yurisdiksi pasar, dan (2) perpajakan global yang minimal terkait penghindaran pajak.

Salah satu tantangan apabila memajukan agenda ini, adalah tidak tercapainya konsensus. Apabila konsensus tidak tercapai, negara-negara akan memberlakukan kebijakan unilateral dan *interim measures*.

Rekomendasi di Bidang Ekonomi Digital

a. Isu Lokalisasi Data

Anggota G20 mengakui keperluan untuk menangani tantangan perlindungan privasi dan data pribadi sesuai dengan kerangka kerja hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan prinsip *lawfulness*, *fairness*, *transparency* dan *reciprocity*.

b. Isu HAKI

- i. Memperkuat tukar menukar ide, pengalaman dan informasi dengan upaya mendorong penguatan kebijakan yang ramah inovasi untuk memaksimalkan potensi teknologi digital dan menghilangkan hambatan atas inovasi;
- ii. Menghormati kerangka kerja hukum yang berlaku dan bekerja untuk membangun kepercayaan konsumen, perlindungan atas privasi, data, serta HAKI, khususnya bagi para kreator dan pelaku ekonomi digital domestik; dan
- iii. Memperkuat tukar menukar data, ide dan informasi termasuk pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku untuk mendukung peningkatan akses, adopsi dan pemanfaatan teknologi digital yang efektif dan memungkinkan kita untuk belajar satu sama lain dengan secara tangkas.

c. Isu Perpajakan Digital

- i. Bekerjasama untuk mewujudkan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan dan modern; dan
- ii. Menyambut baik inisiatif dari organisasi internasional tempat negara anggotanya mendiskusikan penyusunan sistem perpajakan yang menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan daya saing para pelaku ekonomi digital termasuk UMKM.

4.3.2 Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sumber Daya Manusia

Dalam mendorong peningkatan daya saing dan produktivitas manusia dalam pemanfaatannya sebagai sumber daya manusia (SDM) yang efektif, terdapat 3 (tiga) rekomendasi bagi pembahasan agenda prioritas Presidensi Indonesia pada 2022 dari aspek ketenagakerjaan, pendidikan, dan sumber daya manusia melalui masing-masing *working groups* EWG, EdWG, dan DWG.

4.3.2.1 Aspek Ketenagakerjaan (EWG)

Pembahasan isu ketenagakerjaan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) tema besar, yaitu:

- (1) meningkatkan daya keterserapan lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, dan peningkatan produktivitas SDM;
- (2) meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan; dan
- (3) mempromosikan ketenagakerjaan usia muda.

Untuk mendorong peningkatan keterserapan dan produktivitas, aspek-aspek yang dapat dibahas, di antaranya, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi; perluasan kesempatan dengan mendorong sektor UMKM melibatkan peran pemuda dan wanita dalam pengembangan usahanya; pengembangan sinergi sistem pelatihan ketenagakerjaan dan industri; serta kerangka sistem pelatihan dan pemagangan terpadu.

Tabel 8
Aspek-aspek Pembahasan Isu Ketenagakerjaan pada
Presidensi Indonesia di G20

<i>Improving Empowerment and Productivity</i>	<i>Enhancing Social Protection</i>	<i>Promoting Youth Employment</i>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kualitas pelatihan vokasi ✓ Memperluas kesempatan dengan memprioritaskan sektor UMKM untuk melibatkan peran serta pemuda dan wanita dalam pengembangan usahanya ✓ Sinergi sistem pelatihan ketenagakerjaan dan industri ✓ Kerangka sistem pelatihan dan pemagangan terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan prinsip dan penerapan <i>Decent Work</i> dan K3 di tempat kerja ✓ Mengadaptasi perlindungan sosial yang layak dan sesuai dengan jenis/bentuk pekerjaan baru ✓ Memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor informal ✓ <i>Green jobs</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memanfaatkan bonus demografi (64% masyarakat produktif pada tahun 2030) ✓ Semakin pentingnya pelatihan vokasi dalam peningkatan daya saing manusia ✓ Memperluas cakupan dan jejaring pemagangan melalui <i>G20 Youth Apprenticeship Network (G20 YAN)</i> ✓ Meningkatkan partisipasi pemuda dalam <i>Digital Entrepreneurship</i>

Workstream: Employment Working Group, Pertemuan Menteri-menteri Ketenagakerjaan

Sumber: Paparan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kemenaker dan Wakil Ketua KADIN Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20,” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020; Masukan dari perwakilan L20 Indonesia dan T20 Kanada, dan hasil kajian.

Untuk meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja, aspek-aspek pembahasan dapat meliputi upaya memperkuat prinsip dan menerapkan *Decent Work* dan K3 di tempat kerja; *green jobs*; upaya mengadaptasi perlindungan sosial yang layak dan sesuai dengan jenis pekerjaan baru; dan upaya memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor informal.

Untuk mempromosikan angkatan kerja muda, aspek-aspek yang dapat dibahas mencakup, antara lain, strategi-strategi memanfaatkan bonus demografi; peningkatan daya saing melalui pelatihan vokasi; perluasan cakupan dan jejaring pemagangan melalui pembentukan *G20 Youth Apprenticeship Network* (G20 YAN); dan upaya meningkatkan partisipasi pemuda dalam *Digital Entrepreneurship*. Isu-isu lain yang dapat dibahas adalah dorongan dan fasilitasi mobilitas tenaga kerja, termasuk lulusan lembaga pendidikan vokasi, dan regulasi dalam pasar tenaga kerja internasional yang memfasilitasi mobilitas tenaga kerja.

Tema-tema tersebut dapat dibahas secara intensif dalam EWG yang kemudian hasilnya dibahas lebih lanjut dan disepakati dalam Pertemuan Para Menteri Tenaga Kerja. EWG perlu bekerja sama dengan EdWG untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang dapat memenuhi standar kualifikasi untuk mendapat pengakuan internasional, sehingga lulusan lembaga pendidikan benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar tenaga kerja internasional.

4.3.2.2 Aspek Pendidikan (EdWG)

Terkait isu pendidikan, fokus pembahasan mencakup aspek pengembangan sinergi antara sistem pendidikan dan industri, termasuk pengembangan tata kelola pendidikan yang efisien dan efektif; aspek modernisasi dan digitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dengan penekanan pada keterlibatan industri; dan aspek kerja sama internasional untuk mendukung lulusan yang dapat memasuki pasar kerja internasional.

Aspek kelembagaan termasuk: (1) landasan pengembangan industri dan SDM - standarisasi (SKKNI), pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan, sertifikasi; (2) penguatan ekosistem bagi pengembangan industri dan SDM - komite vokasi, perencanaan tenaga kerja, informasi pasar kerja, asosiasi bisnis, badan pengembangan tenaga kerja dan dewan industri; (3)

tata kelola pendidikan vokasi (pemerintah pusat dan daerah, industri dan UMKM, asosiasi dan lembaga pendidikan); (4) Kerangka Sistem Pemagangan Terpadu; (5) kerangka pendanaan.

Aspek modernisasi dan digitalisasi di antaranya mencakup: (1) penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan pendidikan 4.0; (2) pemanfaatan teknologi digital dalam *online learning* dan *training and vocational education*; (3) peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan (administrasi pendidikan) dan siswa didik dalam pemanfaatan teknologi digital; (4) penguatan *mindset* baru tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan di kalangan para pemangku kepentingan; (5) *digital education for the poor*; (6) *effective homeschooling*.

Tabel 9
Aspek-aspek Pembahasan Isu Pendidikan pada Presidensi Indonesia di G20

<i>Developing Synergy of Education System and Industry</i>	<i>Modernisation and Digitalisation of Education</i>	<i>International Partnership for Promoting "Kampus Merdeka" Education</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan pengembangan industri dan SDM: standarisasi (SKKNI), pengembangan infrastruktur pendidikan dan pelatihan, sertifikasi 2. Penguatan ekosistem bagi pengembangan industri dan SDM: komite vokasi, perencanaan tenaga kerja, informasi pasar kerja, asosiasi bisnis, badan pengembangan tenaga kerja dan dewan industri 3. Tata kelola pendidikan vokasi (pemerintah pusat dan daerah, industri dan UMKM, asosiasi dan lembaga pendidikan) 4. Kerangka Sistem Pemagangan Terpadu 5. Kerangka pendanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan pendidikan 4.0 2. Pemanfaatan teknologi digital dalam <i>online learning</i> dan <i>training and vocational education</i> 3. Peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan (administrasi pendidikan) dan siswa didik dalam pemanfaatan teknologi digital 4. Penguatan <i>mindset</i> baru tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan di kalangan para pemangku kepentingan 5. <i>Digital education for the poor</i> 6. <i>Effective Home Schooling</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>compendium</i> praktik baik pengembangan pendidikan vokasi 2. Eksplorasi peluang magang di negara-negara G20 3. Mobilitas tenaga pengajar untuk pengembangan kapasitas 4. Mobilitas siswa dan mahasiswa baik secara fisik maupun virtual/online 5. <i>Knowledge-sharing</i> tentang desentralisasi dalam bidang pendidikan vokasi 6. Transfer <i>knowledge</i> penggunaan teknologi untuk <i>online learning</i>
<p><i>Workstream: Education Working Group, Pertemuan Menteri-menteri Pendidikan</i> Pertemuan Bersama: EdWG dan EWG; Menteri-menteri Pendidikan G20, Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 dan Menteri-menteri Keuangan G20</p>		

Sumber: Paparan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan B20 Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20,” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, 5 Agustus 2020, Masukan Wakil T20 Kanada dan Hasil Kajian.

Aspek kerja sama kemitraan untuk pengembangan pendidikan di antaranya mencakup: (1) eksplorasi peluang kegiatan magang di industri di negara-negara G20; (2) mobilitas tenaga pengajar untuk pengembangan kapasitas guru dan dosen, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan vokasi negara-negara G20; (3) mobilitas siswa dan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran siswa dan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan vokasi; (4) *knowledge sharing* tentang desentralisasi pendidikan vokasi supaya lulusan pendidikan vokasi dapat segera terserap di pasar tenaga kerja lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang nantinya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan global; (5) penyusunan *compendium* praktik baik pengembangan pendidikan vokasi.

Pembahasan tema-tema ini dilakukan dalam EWG dan hasilnya disampaikan pada pertemuan Para Menteri Pendidikan G20 untuk menjadi referensi dalam membangun kesepakatan. EdWG berkoordinasi dengan EWG terutama membahas tentang kerangka kualifikasi yang dapat memenuhi kebutuhan industri termasuk jenis-jenis pekerjaan di masa depan, mengantisipasi jenis-jenis pekerjaan masa kini yang hilang di masa yang akan datang sehingga lembaga-lembaga pendidikan dapat mengantisipasi dengan menyusun kurikulum antisipatif jenis-jenis pekerjaan di masa depan.

4.3.2.3 Aspek Sumber Daya Manusia (DWG)

Development Working Group yang memiliki mandat untuk memastikan inklusivitas manfaat G20 bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berpendapatan rendah (*Lower Income Countries/ LICs*), dapat mengangkat pembahasan sektor pengembangan SDM sebagai fokus prioritas di tahun 2022. Dalam menetapkan aspek-aspek pembahasan isu SDM, terdapat sejumlah rambu-rambu yang harus menjadi perhatian.

Pertama, fokus prioritas yang diusulkan untuk dibahas dalam DWG harus menyesuaikan dengan tujuan pembentukan DWG dan *comparative advantage*, yaitu mempersempit kesenjangan pembangunan antarnegara dan intra negara, dengan sasaran pada LICs dan menyelaraskan dengan pencapaian Agenda 2030. Kedua, pembahasan diarahkan untuk mendorong

upaya menjalin pertukaran informasi dan memperkuat koherensi dengan *G20 workstream* lain.

Ketiga, pemilihan isu yang diangkat mempertimbangkan pelaksanaan/implementasi dari inisiatif/komitmen. Keempat, pemilihan isu pembahasan merujuk pada prinsip-prinsip dalam *Seoul Development Consensus for Shared Growth* (2010), yaitu fokus pada pertumbuhan ekonomi, kemitraan pembangunan global, isu sistemik global dan regional, melengkapi/menghindari duplikasi dan berorientasi pada hasil.

Tabel 10
Aspek-aspek Pembahasan Isu SDM pada
Presidensi Indonesia di G20

<i>Sustainable Development Sector: Pembangunan SDM</i>	Pertukaran Informasi dan Koherensi, dan Peningkatan Kerja sama Internasional	Peningkatan Pembiayaan untuk SDGs terkait Pengembangan SDM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersempit kesenjangan pembangunan SDM antarnegara dan intra negara 2. <i>Early Childhood Development</i> untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di LICs 3. Mengevaluasi hasil monitoring efektivitas berbagi pengetahuan dan pelatihan di negara-negara LICs 4. Identifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan dan strategi membangun kapasitas nasional di LICs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Digital education for the poor in LICs</i> 2. Mendorong kerja sama Selatan-Selatan dan <i>Triangular</i> untuk meningkatkan program dan kegiatan pengembangan daya saing dan produktivitas SDM di negara-negara LICs 3. Penyusunan indikator dan <i>guiding principles</i> dalam menyediakan <i>vocational training</i> berkualitas di negara berkembang dan negara berpendapatan rendah 4. Mendorong OI untuk mengidentifikasi dan memperkuat instrumen, mekanisme dan komitmen finansial untuk mendukung pengembangan pendidikan di LICs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi tujuh tahun perwujudan <i>Agenda 2030 for Sustainable Development Goals/SDGs</i> (2015 – 2022) dan akselerasi perwujudan SDGs (2023 – 2030). 2. Evaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan perwujudan SDGs 3. Menggali dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan SDGs termasuk <i>blended finance</i> untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan pembiayaan perwujudan SDGs, khususnya tujuan-tujuan yang terkait pembangunan sumber daya manusia di LICs
<p><i>Workstream: Development Working Group</i> Pertemuan bersama DWG, EdWG dan EWG</p>		

Sumber: Presentasi Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kemen PPN/Bappenas, pada FGD Keketuaan Indonesia pada G20, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020 dan hasil kajian.

Aspek pembahasan yang dapat diangkat dalam DWG meliputi:

1. Pembahasan isu yang belum tuntas, namun sangat terkait dengan pembangunan daya saing dan produktivitas SDM, seperti:
 - a) *Early childhood development* yang mendukung peningkatan kualitas SDM;
 - b) Mengevaluasi hasil *monitoring* efektivitas aktivitas berbagi pengetahuan (*knowledge-sharing*) mengenai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan di negara-negara berpendapatan rendah; dan
 - c) Bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional terkait identifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan keterampilan dan strategi membangun kapasitas nasional dalam menyelenggarakan pelatihan yang berkualitas untuk semua pemangku kepentingan di negara-negara berpendapatan rendah.
2. Mendorong kemitraan global dan regional untuk membangun SDM di negara-negara LICs supaya daya saing dan produktivitas meningkat:
 - a) Kerja sama Selatan Selatan dan *Triangular* meningkatkan aktivitas terkait pengembangan pendidikan, termasuk pendidikan vokasi; dan
 - b) Meminta organisasi-organisasi internasional, bank-bank pembangunan multilateral (MDBs), dan institusi-institusi finansial lainnya untuk mengidentifikasi dan memperkuat instrumen-instrumen, mekanisme, dan kemitraan finansial untuk mendukung pengembangan pendidikan khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi di negara-negara berkembang, khususnya negara berpendapatan rendah.
3. Pentingnya pembiayaan untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) utamanya SDG 4, 5, 8, 10.
 - a) Evaluasi pencapaian SDGs dan perumusan strategi akselerasi perwujudan SDGs sehingga dengan waktu 5-8 tahun sejak 2022,

negara-negara G20 memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melakukan akselerasi perwujudan Agenda 2030.

- b) Evaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya memobilisasi pembiayaan untuk menutup kesenjangan kebutuhan pendanaan perwujudan SDGs; dan
- c) Perumusan strategi baru untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan alternatif di luar APBN, khususnya *blended financing*.

DWG berkoordinasi dengan EWG dan EdWG untuk memastikan koherensi pembahasan pembangunan sumber daya di tiap-tiap *working group* sehingga menghasilkan kerangka kebijakan yang dapat berdampak efektif.

Rekomendasi untuk Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas SDM

1. Mengidentifikasi dan membahas isu penting yang belum tuntas pada forum G20 sebelumnya:
 - a. Berkomitmen kembali terhadap *early childhood development* (pengembangan anak usia dini / PAUD) yang dapat mendukung peningkatan kualitas SDM;
 - b. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil *monitoring* efektivitas aktivitas berbagi pengetahuan (*knowledge-sharing*) mengenai keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan, utamanya pasca pandemi COVID-19;
 - c. Memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan dan strategi membangun kapasitas nasional.
2. Mendorong kemitraan global dan regional untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas manusia Indonesia:
 - a. Mendorong penguatan kerja sama Selatan Selatan dan *Triangular* yang mengarah pada aktivitas pengembangan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - b. Mendorong komitmen organisasi-organisasi internasional, bank-bank pembangunan multilateral (MDBs), dan institusi-institusi finansial lain untuk mengidentifikasi dan memperkuat instrumen-instrumen, mekanisme, dan kemitraan finansial untuk pendidikan dan pelatihan vokasi di negara-negara berkembang dan *emerging economies*;

- c. Membentuk jejaring UMKM global (*Global MSMEs Network*) untuk menjalin kemitraan diantara pelaku UMKM, termasuk peningkatan kapasitas SDM UMKM;
- d. Mendorong perluasan kesempatan kerja bagi perempuan agar peranan perempuan lebih produktif dalam membantu pemulihan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) Universitas Gadjah Mada. 2020. “*Norm-Setting* Ekonomi Digital Dalam Rangka Presidensi Indonesia di Forum G20”. 17 September 2020.
- Tim Riset G20 Universitas Parahyangan. 2020. “Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia Indonesia”. September 2020.
- Presentasi *Powerpoint*: “Masukan Sherpa G20 Indonesia Terhadap Substansi Presidensi G20 Tahun 2022 “, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, disampaikan pada Rapat Konsultasi Antar K/L Persiapan Substansi Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Kementerian Luar Negeri, 8 Desember 2020.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. 1998. “*International Norm Dynamics and Political Change.*” *International Organization* 52 (4): 887–917. Diakses at <https://j.mp/2E0Ha5u> tanggal 28 Desember 2020
- World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019.*
- United Nations Development Programme, Human Development Report 2019.*
- IMD World Competitiveness Center, IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020.*
- <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/prioritas-indonesia>
- Paparan Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia Indonesia”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020.
- BKPM, dikutip dari Paparan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas

Manusia Indonesia”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020.

BPS, dikutip dari Paparan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20: Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Manusia Indonesia”, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020.

Paparan Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kemenaker dan Wakil Ketua KADIN Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20,” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020; Masukan dari perwakilan L20 Indonesia dan T20 Kanada, dan hasil kajian.

Paparan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan B20 Indonesia pada FGD “Keketuaan Indonesia pada G20,” Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, 5 Agustus 2020, Masukan Wakil T20 Kanada dan Hasil Kajian.

Presentasi Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kemen PPN/Bappenas, pada FGD Keketuaan Indonesia pada G20, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, BPPK Kemenlu, 5 Agustus 2020 dan hasil kajian.